

**LAPORAN HIBAH PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL BATCH II
TAHUN 2009**

**JUDUL RISET
MODAL SOSIAL (*SOCIAL CAPITAL*) MASYARAKAT JAWA
TIMUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK POLITIK
DI MASYARAKAT**

Kluster Psikologi



**ASPEK:
INTEGRASI BANGSA, HARMONI SOSIAL**

**Nama Peneliti:
Suryanto
NIP 131 999 640
Sudaryono
NIP 130 873 455
Ilham Nur Alfian
NIP 132 303 986**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Nopember 2009**

**LAPORAN HIBAH PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL BATCH II
TAHUN 2009**

KKB
kk-2
LP. 202/10
Sur
M

**JUDUL RISET
MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) MASYARAKAT JAWA
TIMUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK POLITIK
DI MASYARAKAT**

Kluster Psikologi

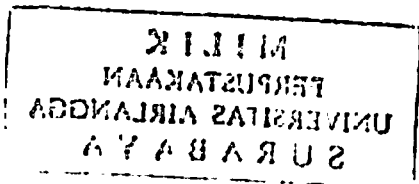


MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**ASPEK:
INTEGRASI BANGSA, HARMONI SOSIAL**

**Nama Peneliti:
Suryanto
NIP 131 999 640
Sudaryono
NIP 130 873 455
Ilham Nur Alfian
NIP 132 303 986**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Nopember 2009**



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

1. Judul Riset : Modal Sosial (*Social Capital*) Masyarakat Jawa Timur Dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Politik Di Masyarakat
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Suryanto
- b. Jenis kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 131 999 640
- d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- e. Jabatan Struktural : Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Unair
- f. Bidang Keahlian : Psikologi Sosial
- g. Fakultas / Departemen : Fakultas Psikologi / Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
- i. Tim peneliti


No	Nama	Bidang keahlian	Fakultas/Departemen	Perguruan Tinggi
1.	Drs. Sudaryono, SU	Psikologi Sosial dan Perkembangan	Psikologi	Unair
2.	Ilham Nur Alfian, S.Psi,M.Psi	Psikologi Sosial	Psikologi	Unair

10. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :
- a. Jakwa Waktu penelitian : 1 tahun
- b. Biaya total yang diusulkan : Rp.100.000.000,-
- c. Biaya yang disetujui 2009 : Rp. 97.000000


Surabaya, 9 Pebruari 2009
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan Fakultas Psikologi INAIR


Dr. Seger Handoyo
NIP. 131 687 698


Prof Dr. Suryanto
NIP. 131 999 640

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unair


Prof Dr. Bambang Sektari Lukiswanto, DEA, drh
NIP 131 535 837 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan sesuai batas akhir waktunya. Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pimpinan Universitas Airlangga, pimpinan beserta staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, serta pimpinan serta staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dan Bakesbangpol dan linmas tingkat daerah, khususnya kota Surabaya, kota Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sampang, dan kabupaten Banyuwangi, yang telah banyak membantu penulis dan tim peneliti dalam mendapatkan narasumber. Tidak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota peneliti dan staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dan semua pihak yang telah banyak membantu demi penyelesaian penelitian ini.

Penelitian mengenai "Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Politik Masyarakat Jawa Timur" ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami sebagai bagian dari civitas akademika Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk turut berkontribusi dalam memberikan solusi mengenai persoalan-persoalan kebangsaan dalam konteks kekinian. Besar harapan kami, penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan stimulasi untuk munculnya penelitian-penelitian dalam disiplin psikologi yang memiliki andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, khususnya ketika gejala pertikaian antar kelompok masyarakat memperlihatkan frekuensi meningkat menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang.

Surabaya, Nopember 2009

Peneliti,

DAFTAR ISI

	hal.
Halaman sampul	i
Lembar Pengesahan Laporan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	3
C. Tujuan Khusus	4
D. Pentingnya Penelitian yang Direncanakan	4
BAB II STUDI PUSTAKA	
A. Definisi Konflik	5
B. Macam-Macam Bentuk Konflik	7
C. Proses Terjadinya Konflik	8
D. Model Resolusi Konflik	10
E. Konflik Etnis dan Konflik Politik dalam Masyarakat	12
F. Konflik Sosial: Perspektif Teoritis	14
G. Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)	19
H. Modal Sosial dan Solusi Konflik	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek penelitian	27
D. Pengumpulan Data	28
E. Analisis data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN	
A. Setting Penelitian	30
B. Gambaran Lokasi Sampling Penelitian	36
C. Pola Konflik Politik di Masyarakat Jawa Timur	51
D. Pola Penyelesaian Konflik Politik Masyarakat Jawa Timur	59
E. Modal Sosial Penyelesaian Konflik Politik di Jawa Timur	64
F. Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Jawa Timur	69
G. Pembahasan	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan	81
Lampiran 2 Pedoman wawancara FGD	82
Lampiran 3 Dokumentasi FGD	83
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian	84

MODAL SOSIAL (*SOCIAL CAPITAL*) MASYARAKAT JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK POLITIK DI MASYARAKAT

Suryanto, Sudaryono, Ilham Nuralifian

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis (a) pola konflik politik masyarakat Jawa Timur (b) pola penyelesaian konflik politik masyarakat Jawa Timur (c) modal sosial yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Jawa Timur dan (d) lembaga / institusi sosial yang mengembangkan modal sosial di masyarakat Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diambil dari wawancara mendalam dan diskusi terfokus dari para narasumber yang berkompeten. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Kesimpulan penelitian ini adalah (a) Pola konflik politik di masyarakat Jawa Timur umumnya tidak bersifat terbuka, dan cenderung latent. Walaupun sampai terbuka, maka peran elit dan tokoh masyarakat sangat dominan. (b) Penyelesaian konflik di Jawa Timur melalui berbagai media. Penyelesaian secara langsung dilakukan bila terjadi konflik yang terbuka. (c) Modal sosial yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Jawa Timur adanya sejumlah forum komunikasi, LSM, pers dan media massa, serta tokoh masyarakat, (d) Para pelaku yang mengembangkan modal sosial yang selama ini ada di masyarakat terdiri dari tiga unsur yaitu pemimpin formal dan perangkatnya, figur pemimpin informal di masyarakat, dan pers dan media massa

Saran yang bisa dikembangkan berdasarkan penelitian ini adalah perlunya pendidikan politik bagi tokoh masyarakat, anggota legislatif, dan penggalan modal sosial lainnya yang bermanfaat berdasarkan pada kultur setempat.

Kata Kunci: *konflik politik, modal sosial, Jawa Timur*

SOCIAL CAPITAL IN EAST JAVA COMMUNITY FOR COMPLETING POLITICAL CONFLICT IN COMMUNITY

By:

Suryanto, Sudaryono, Ilham Nuralfian
Department of Personality and Social Psychology
Faculty of Psychology Airlangga University Surabaya

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze (a) the pattern of political conflict in East Java community (b) patterns of political conflict resolution in East Java community (c) social capital into a model of political conflict resolution in East Java, and (c) institutional/ social institutions that develop social capital in East Java community.

Research methods used were qualitative methods. Data collected from five districts / Cities in East Java, namely: Sampang District, Banyuwangi District, Malang City, Madiun District, and Surabaya City. Primary research data were drawn using in-depth interviews and focused group discussions (FGD) from competent sources, then data analysis was descriptively analytic.

The conclusions of this study were (a) The patterns of political conflict in East Java community are generally not open, and tend to be latent. If the conflict opened, then the role of elites and community leaders are dominant. (b) The conflict resolution in East Java through various ways. If conflict opened, direct resolution must be done soon (c) Social capital into a model of political conflict resolution in East Java there were a number of communication forums, NGOs, the press and mass media, and community leaders, (d) The actors that developed social capital in the community consist of three elements namely: formal leaders and instrumentalities, the figure of informal leaders in the community, and the press and mass media

Suggestions that could be developed on the basis of this research was the need for political education for community leaders, legislators, and other social capital excavation useful based on the local culture.

Keywords: *political conflict, social capital, East Java*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik di Indonesia sudah merupakan kejadian yang sangat sering terjadi. Konflik tidak hanya terjadi dalam keluarga sebagai pribadi, melainkan sudah merembak pada tingkatan nasional. Letjen (Pur) Kiki Syanakri di Harian Umum Suara Pembaharuan menggambarkan bahwa sumber konflik di Indonesia setidaknya terdiri dari lima faktor, yaitu: ideologi/agama, politik, ekonomi, antar-etnis, dan separatisme (<http://www.hupelita.com/cetakartikel.php.id-23986>). Dari inventarisasi Panitia Pengawas Pemilu, setidaknya terdapat tujuh daerah yang rawan konflik di Indonesia. Di antaranya adalah kawasan Pantura, daerah "tapal kuda" di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kalimantan, Jawa Timur, dan Jakarta (Tempo 2/9). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang dipetakan sebagai daerah yang memiliki konflik tersebut, terutama konflik politik dan ekonomi.

Meskipun selama ini Jawa Timur dipetakan sebagai daerah rawan konflik, hasil pengamatan selama ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur tidak pernah terjadi eskalasi konflik sampai pada tingkat tertinggi yaitu tindakan anarkis massa yang berakibat pada lumpuhnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Bahkan bila dibandingkan dengan di Jawa Tengah dan Jakarta di tahun 1997/1998, kondisi di Jawa Timur lebih kondusif dan hampir tidak terjadi

kegiatan pembakaran dan pengrusakan seperti yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

Dalam pemilihan Gubernur di Jawa Timur tahun 2008 yang berlangsung sampai tiga kali putaran, kondisi masyarakat Jawa Timur relatif aman, walaupun pemilihan gubernur ini berlangsung sampai tahap ketiga untuk daerah Bangkalan dan Sampang, dan penghitungan ulang untuk daerah Kabupaten Pamekasan. Proses pemilihan yang panjang ini tidak sampai menimbulkan konflik horizontal seperti daerah Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Munculnya ketenangan warga, situasi kondusif, tidak munculnya konflik terbuka dan tidak timbulnya masalah konflik politik di masyarakat tentunya tidak akan terjadi tanpa alasan. Pada penelitian ini modal sosial dipandang sebagai modal yang diduga mampu meredam dan mereduksi potensi konflik politik yang ada di masyarakat Jawa Timur.

Fukuyama dalam bukunya "Trust" mendefinisikan bahwa modal sosial (*social capital*) sebagai norma informal yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat. Dari definisi ini Fukuyama melihat bahwa aspek kerjasama (*cooperation*) menjadi unsur penting dalam berusaha. Untuk bekerjasama diperlukan kepercayaan diantara anggota kelompok yang bekerjasama. Oleh karena itu kepercayaan atau (*trust*) menjadi syarat yang mutlak. Bagaimana orang bisa kerjasama bila tidak didasari oleh sifat ini.

Pada kesempatan lainnya, Putnam (1995) melihat modal sosial sebagai fitur kehidupan sosial. Fitur ini terdiri dari jejaring (*networks*), norma (*norms*)

kepercayaan (*trust*) yang mampu menggerakkan partisipasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Disamping itu, Lin (2001) mencoba membedakan konsep antara modal sosial dengan jaringan sosial (*social networks*). Dalam definisinya tentang modal sosial, ia menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dan digunakan oleh para pelakunya untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagai suatu modal dalam penyelesaian konflik, modal sosial yang berupa kepercayaan (Fukuyama, 1995), jaringan sosial, dan norma (Putnam, 1995), serta adanya sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial (Lin, 2001) akan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik di masyarakat Jawa Timur. Dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini sudah membuktikan kecilnya konflik politik yang berakibat anarkisme walaupun potensi untuk terjadinya konflik horizontal sangat terbuka lebar.

B. Permasalahan Penelitian :

Dari latar belakang masalah penelitian di atas, beberapa permasalahan penelitian yang dapat diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- (1) Bagaimanakah pola konflik politik di masyarakat Jawa Timur?
- (2) Bagaimanakah pola penyelesaian konflik politik masyarakat Jawa Timur?

(3) Modal sosial apakah yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Jawa

Timur?

(4) Siapakah yang mengembangkan modal sosial yang selama ini ada di masyarakat?

C. Tujuan Khusus

(1) Mengidentifikasi modal-modal sosial yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di Jawa Timur

(2) Mengembangkan model penyelesaian konflik politik di masyarakat Jawa Timur dengan mendasarkan pada modal sosial yang ada sehingga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dicapai

D. Pentingnya Penelitian yang Direncanakan

Penelitian ini perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan:

(1) Kasus-kasus konflik di Jawa Timur cukup tinggi

(2) Keragaman (diversitas) etnik, agama, budaya dan kelompok masyarakat cukup banyak

(3) Banyak potensi konflik, namun yang sempat muncul tidak sampai menimbulkan anarkisme yang berlebihan

(4) Belum ada model penanganan masalah konflik politik yang dikaji secara ilmiah berdasarkan pada modal sosial masyarakat setempat

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Definisi Konflik

Istilah konflik ini secara *etimologis* berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama, dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>).

Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu.

De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan bahwa *conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to*. Dari definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau oposisi antara dirinya dengan individu atau kelompok

lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau praktik-praktik lainnya.

Robbins (2001) menyebut konflik sebagai *a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests*. Dalam definisi ini tampak bahwa konflik dapat terjadi ketika usaha suatu kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga kelompok ini mengalami frustrasi.

Kondalkar (2007) yang mengutip pendapat Thomas menyatakan bahwa konflik sebagai *process that begins when one party perceives that another party has negatively affected something that the first party cares about*. Proses konflik bermula ketika satu partai mempersepsi bahwa partai lain memiliki afeksi (perasaan) negatif.

Kondalkar (2007) juga melanjutkan bahwa *conflict "as a disagreement between two or more individuals or groups, with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over others*. Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konflik merupakan ketidaksetujuan (disagreement) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima panangan atau tujuannya oleh individu atau kelompok lain.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu hasil persepsi individu ataupun kelompok yang masing-masing kelompok

merasa berbeda dan perdebatan ini menyebabkan adanya pertentangan dalam ide ataupun kepentingan, sehingga perbedaan ini menyebabkan terhambatnya keinginan atau tujuan pihak individu atau kelompok lain.

B. Macam-macam Bentuk Konflik

Dilihat dari manifestasinya, Pondy (1969) menggambarkan adanya dua macam bentuk konflik, yaitu konflik yang laten dan konflik yang manifest. Konflik laten meliputi konflik yang dipersepsi dan dirasakan seseorang atau kelompok. Sebaliknya, konflik manifest meliputi konflik yang membutuhkan negosiasi artinya dapat terjadi secara dinamik antar individu ataupun antar kelompok. Konflik ini sering memunculkan terjadinya penyimpangan (*violence*).

Ditinjau dari tingkat analisisnya, maka konflik dapat diklasifikasi dalam beberapa tingkatan, yaitu: tingkatan individual, tingkatan kelompok, tingkatan organisasi. Pada tingkatan individual, konflik dapat terjadi karena predisposisi (seperti dogmatisme, persetujuan, motif kekuasaan), atau karakteristik pekerjaan (seperti ambiguitas kerja, anatomi pekerjaan), proses konfliknya meliputi konflik pada kondisi motivasi, kognisi, afeksi, dan efeknya dapat terjadi pada kesejahteraan dan kesehatan, tingkat absensi dan pindah kerja (Kondalkar, 2007).

Ditinjau dari fungsinya bagi individu ataupun organisasi, Kondalkar (2007) melihat bahwa konflik itu dapat dibedakan dalam dua macam yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik dikatakan fungsional apabila : (1) konflik dapat meningkatkan kekompakan anggota dalam organisasi

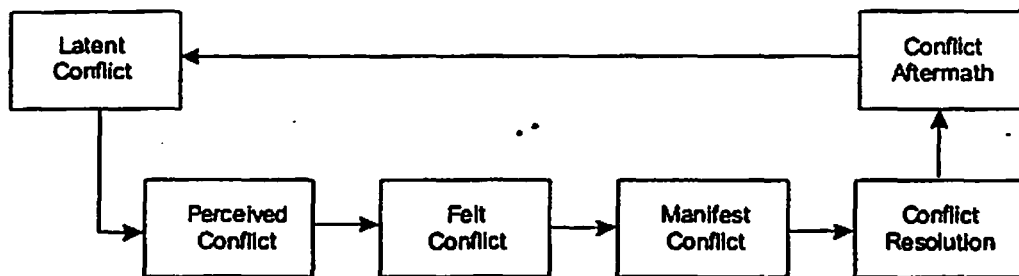
sehingga tujuan kelompok menjadi prioritas. (2). Konflik dapat mendorong munculnya inovasi dan kreativitas ketika merasa adanya semangat berkompetisi di dalam kelompok, (3). Konflik dapat meningkatkan lingkungan kerja dan meningkatkan kesempatan untuk pengembangan diri (*self-development*) suatu kelompok sehingga mendorong terbentuknya normas kelompok, (4). meningkatkan budaya kerja yang mendukung peningkatan berbagai system dalam organisasi dan akhirnya pertumbuhan dapat tercapai.

Konflik menjadi Dis-fungsional ketika dalam konflik tersebut dapat diidentifikasi adanya beberapa gejala berikut: (1) ketika konflik tidak mendorong adanya solusi, (2) Ketika tujuan dasar (*basic goals*) organisasi ditolak, (3). Orang diperlakukan tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan berkembangnya antagonisme dan konflik, (4). Konflik mendorong terjadinya peningkatan tingkat ketidakhadiran dan keluarnya anggota kelompok, (5). munculnya gaya manajemen ganda yang menghasilkan kebingungan dan konflik disfungsional, (6). terjadinya ketidaksetujuan dalam management yang berakibat pada disloyalitas, dan hilangnya ketegangan anggota untuk menunjukkan kreativitas kerja.

C. Proses Terjadinya Konflik

Pondy (1967) menggambarkan konflik dalam empat cara (tahapan), yaitu: (1). berawal dari adanya keterbatasan sumberdaya, (2). Munculnya perasaan individu seperti adanya stress, ketegangan, permusuhan (*hostility*), kecemasan

(anxiety), (3). Adanya keadaan kognitif individu yang menghasilkan persepsi atau kesadaran adanya situasi konflik, dan (4). munculnya perilaku konflik itu sendiri yang merentang mulai dari resistensi hingga agresi yang nyata. Keempat hal ini dapat dilihat seperti model berikut



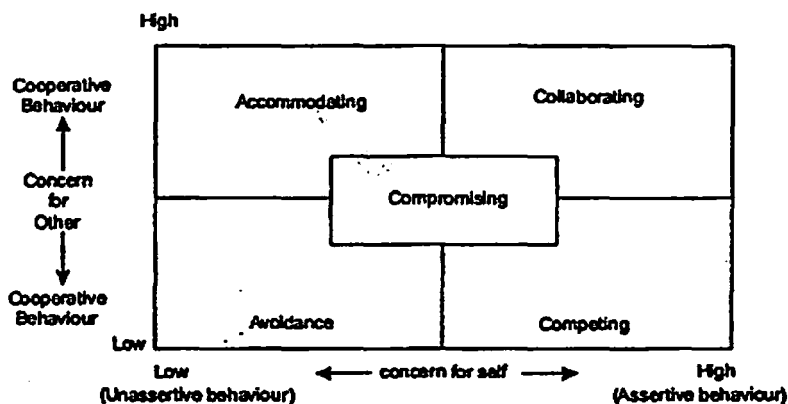
Gambar 1. Episode Proses Konflik dari Pondy
Sumber: Kondalkar, (2007. hal. 167)

Charles Watkins menyatakan bahwa konflik dapat terjadi bila terdapat dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/ operasional dapat saling menghambat. Secara potensial artinya, mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional maksudnya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada didalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Artinya, bila kedua belah pihak tidak dapat menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi.

Kedua, konflik dapat terjadi bila ada sesuatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya salah satu pihak yang akan memungkinkan mencapainya (<http://grms.multiply.com/journal/item/28>).

D. Model Resolusi Konflik

Robbin, (2001) menggambarkan resolusi konflik dalam lima modus seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Model resolusi Konflik

Sumber : Kodnalkar, (2007)

1. **Avoidance.** Pada model resolusi konflik ini satu atau kedua partai, kelompok menghindari konflik. Situasi kelompok tidak memungkinkan untuk bertindak kooperatif dan asertif, dan masing-masing pihak yang berkonflik menghindari pertemuan langsung.

2. **Competing.** Strategi konflik ini diadopsi manakala strategi lain tidak dapat bekerja dengan baik. Kompetisi akan berguna dalam situasi darurat (emergensi) yaitu ketika keputusan cepat harus diambil. Dalam strategi ini, senjata dan kekuatan harus dimanfaatkan secara optimal sehingga penyelesaian segera berakhir. Strategi ini didasarkan pada prinsip manajemen konflik *win-lose principle*.
3. **Collaborating.** Adalah strategi yang melibatkan usaha satu partai untuk bekerjasama dengan partai lainnya dan mencoba menemukan solusi pemecahan masalah yang menguntungkan. Strategi ini menjadi penting ketika solusi yang dibuat menguntungkan kedua belah pihak.
4. **Accommodating.** Dalam strategi akomodasi, orang akan merelakan interesnya untuk diakomodasikan dengan interes orang lain. dalam akomodasi, kedirian dihilangkan dan yang ada bagaimana seseorang menurut pandangan orang lain. Strategi ini dilakukan karena yang dihadapi adalah orang yang memiliki kekuasaan yang lebih kuat, cukup beralasan dan adanya kemauan baik.
5. **Compromising.** Dalam situasi konflik ini, strategi ini dipilih kedua partai ketika mereka sama-sama ingin mencari solusi yang saling menguntungkan dan bias diterima kedua belah pihak. Dalam kompromi, tidak diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. tidak ada satu pun partai ada yang merasa puas dengan adanya kompromi ini.

E. Konflik Etnis dan Konflik Politik di Masyarakat

Yaqin (2005) mencatat bahwa konflik antar kelompok masyarakat seperti kekerasan antar etnis dapat disebabkan oleh: *pertama*, faktor politik. Kondisi politik yang mengakibatkan bentrok antar etnis karena ketimpangan dalam pembagian wilayah politik. Ketimpangan dalam pembagian wilayah politik ini seperti terjadi di Kalimantan Barat. Setelah pasca kerusuhan masyarakat lokal menuntut agar putra daerah diberi kesempatan untuk menduduki jabatan strategis sebagai pemimpin daerah. Tuntutan ini dilakukan karena selama tiga puluh dua tahun orde baru berkuasa baru satu kali bupati dari putra daerah. *Kedua*, faktor ekonomi. Kelompok etnis yang terpinggirkan secara ekonomi mengadakan perlawanan. Misalnya, keadaan ekonomi etnis Madura lebih baik bila dibandingkan keadaan sosio-ekonomi warga lokal yang dari etnis Dayak. Keadaan ini membuat kecemburuan sosial bagi etnis Dayak. Hal ini menyebabkan timbulnya stereotype dan prasangka dari warga Dayak terhadap warga Madura sebagaimana layaknya penjajah yang angkuh. Sebaliknya warga Madura menganggap warga Dayak sebagai masyarakat bawah yang rendah. *Ketiga*, faktor primordialisme. Contohnya, konflik yang terjadi pada 1996 awalnya dipicu dari masalah sederhana yaitu perkelahian antar beberapa pemuda Dayak dan Madura pada acara konser dangdut di Desa Ledo Kabupaten Sambas. Konflik menjadi besar ketika semangat primordialisme kesukuan mengemuka, yaitu warga Dayak maupun Madura membantu etnisnya masing-masing sehingga pecah kekerasan masa yang menelan ribuan jiwa. Batimang (2005) menambahkan adanya faktor

keempat yang menyebabkan timbulnya konflik antar etnis yaitu perbedaan budaya. Seperti terjadinya konflik antar etnis di Sambas Kalimantan Barat karena perbedaan budaya. Orang-orang Madura di Sambas tinggal berdampingan dengan Dayak. Orang Madura dengan orang Dayak melakukan interaksi sosial, namun tidak terjadi akulturasi budaya.

Tomagola (dalam Yaqin, 2005) menganalisis konflik antar kelompok masyarakat yang berbasis agama di Maluku Utara yang terjadi sejak pertengahan bulan Januari 1999 sampai bulan Mei 2000. Ada tiga penyebab terjadinya konflik agama di Maluku Utara, yaitu: *pertama*, perebutan wilayah agama. *Kedua*, perebutan tambang emas. *Ketiga*, perebutan kursi gubernur Maluku Utara. Shoemake (2005) menambahkan hal yang melatarbelakangi konflik di Maluku yaitu pemeluk dua agama Kristen dan Islam telah memiliki ikatan formal tradisional dalam bentuk sistem aliansi yang disebut *pela*, dimana desa-desa Kristen dipasangkan dengan desa-desa Muslim yang berdekatan. Selain ini komunitas Islam dan Kristen terlibat dalam gotong royong, jika ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan banyak tenaga, seperti pembangunan infrastruktur. Tradisi ini menjadi pudar ketika pemerintah Suharto menggerus mekanisme tradisional untuk resolusi konflik dengan diganti oleh birokrasi ekstensif yang didominasi militer sebagai konsekuensi dari sentralisme kekuasaan. Memudarnya modal sosial tersebut mengakibatkan pecahnya perang antar kelompok masyarakat yang menggunakan panji-panji agama.

Seiring dengan perjalanan reformasi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konflik tidak hanya sebatas pada kelompok etnis dan agama tetapi melebar pada konflik sosial yang lebih luas. Kusnadi (2005) menjelaskan bahwa konflik berbasis etnisitas tidak hanya sebatas pada perbedaan sosial-budaya yang bersifat horisontal, seperti agama, adat istiadat dan tradisi, bahasa, sejarah sosial, gaya hidup, atau nilai-nilai budaya lainnya. Aspek-aspek lain vertikal-struktural, seperti akses dan penguasaan sumber daya ekonomi-politik ikut memberi kontribusi terhadap konflik sosial. Keadaan ini semakin diperparah, ketika sumber daya semakin tinggi nilainya dan terbatas, maka konflik sosial akan semakin intensif dan keras.

Penjelasan dari Kusnadi (2005) telah hadir dalam realitas kehidupan masyarakat, bahkan intensitasnya meninggi dalam realitas kehidupan berbangsa. Berbagai kelompok masyarakat sering bertempur memperebutkan akses ekonomi-politik. Gejala pertikaian antar-kelompok masyarakat memperlihatkan frekuensi meningkat, ketika digelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Kompetisi memperebutkan jabatan gubernur atau bupati menyebabkan konflik antar kelompok masyarakat semakin tajam, bahkan di beberapa daerah sudah melakukan tindakan anarkis.

F. Konflik Sosial: Perspektif Teoritis

Pruitt dan Rubin (2004) mendefinisikan konflik sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan, dimana di dalam proses perebutan kepentingan

tersebut tidak ditemukannya alternatif resolusi konflik yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Definsi dari kedua ahli psikologi sosial tersebut dapat dijabarkan lebih jauh bahwa ada tiga determinan penyebab konflik, antara lain: *pertama*, determinan tingkat aspirasi. Konflik pada determinan tingkat aspirasi sendiri disebabkan oleh prestasi pengalaman masa lalu. Ketika tingkat pencapaian prestasi mengalami kemandekan atau kemerosotan, maka tercipta kesenjangan antara aspirasi dan pencapaian menjadi besar sehingga penyaluran dari rasa kegagalan dalam pencapaian tujuan itu dengan tindakan kekerasan. Prestasi pengalaman masa lalu dapat dilihat pada konflik pemilihan kepala daerah. Misalnya ada salah satu calon kepala daerah gagal meraih kepemimpinan daerah, maka melakukan tindakan mengerahkan masa untuk mencari jalan agar bupati terpilih bisa dijatuhkan. Cara ini tidak membuahkan hasil, strategi lain yang digunakan supaya lawan politik jatuh adalah menggunakan kekerasan sebagai alternatif pemecahan masalah, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah.

Selain prestasi pengalaman masa lalu, aspirasi mengenai kekuasaan memberi kontribusi terhadap konflik sosial. Aspirasi kekuasaan mengandung makna adanya ambiguitas mengenai sifat kekuasaan. Hal ini menyebabkan masing-masing pihak yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan telah melakukan aspirasi melalui proses pemikirannya bahwa pihaknya lebih kuat dari pihak yang lain. Konflik jenis ini juga menjadi pemicu terjadinya konflik di Indonesia. Contohnya, hal yang melatarbelakangi konflik di Maluku yang berbau agama, salah satunya dilatarbelakangi oleh perebutan kepala daerah, di Maluku

Utara. Masing-masing pihak merasa punya hak dan lebih memiliki potensi untuk meraih kursi kepala daerah, sehingga tarik menarik kepentingan yang begitu kuat dan ketidakmampuan mencari solusi pemecahannya maka memunculkan konflik sosial yang berwujud kekerasan massa (Tomagola, dalam Yaqin 2005).

Faktor berikut ikut menyumbang konflik yaitu norma dan aturan. Konflik biasanya terjadi ketika norma sosial dalam keadaan lemah atau sedang mengalami perubahan. Pada keadaan seperti ini, orang akan cenderung membentuk cara pandang yang bersifat *idiosyncratic* mengenai hak-haknya, cara pandang yang tidak cocok dengan cara pandangan yang dibentuk oleh orang lain. Kasus ini dicontohkan oleh Kusnadi (2005) bahwa bupati Banyuwangi yang berasal dari etnik Osing mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan terjadinya ketegangan sosial. Kebijakan bupati Banyuwangi itu antara lain mengharuskan para petinggi pemerintah kabupaten yang akan menghadapnya harus menggunakan bahasa Osing, bahasa Osing sebagai muatan kurikulum lokal diajarkan pada siswa SD-SMP yang belangsung selama tiga tahun, dan mengintruksikan seluruh warga Banyuwangi melakukan tradisi *endog-endogan* dalam rangka peringatan Maulud Nabi. Bukan hanya berhenti sampai di sini, bupati Banyuwangi juga membuat patung *gandrung* yang menelan dana milyaran rupiah. Kebijakan yang diberlakukan bupati Banyuwangi akhirnya mengundang protes dari komunitas yang berbeda yaitu masyarakat Madura. Kasus ini dapat dijelaskan berdasarkan teori ini bahwa terjadinya ketegangan sosial di Banyuwangi karena adanya cara pandang seorang bupati yang ingin menggunakan haknya sebagai bagian dari

komunitas Osing, sehingga mengakibatkan cara pandang yang berbeda dari warga Madura yang tinggal di Banyuwangi, maka tidak terelakkan hal tersebut memunculkan konflik. Selanjutnya membandingkan dengan pihak lain dan terbentuknya kelompok pejuang (*struggle group*) juga memberikan pengaruh terhadap konflik.

Kedua, determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain. Pruitt dan Rubin (2004) mengartikan determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain sebagai suatu sumber konflik karena masing-masing pihak memiliki aspirasi yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak mencapai aspirasi yang sama. Dalam realitas kehidupan sehari-hari konflik ini dapat dilihat pada pihak lain menguasai tanah yang diinginkan, kegagalan dalam memperoleh kenaikan upah yang diinginkan, atau terlibat pertengkaran dengan kolega yang menyebabkan tertanam dalam keyakinan bahwa koleganya akan melakukan hal yang sama di lain waktu. Pengalaman ini mendorong jurang perbedaan semakin melebar pada masing-masing pihak, sehingga menciptakan impuls-impuls agresif yang membuat satu pihak terhadap pihak lain melakukan tindakan sesuai dengan kemauannya sendiri.

Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak. Masing-masing pihak mempersepsikan bahwa tampaknya tidak ada alternatif yang dicapai kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah, sehingga masing-masing pihak berusaha mencapai tujuannya meskipun harus membebankan kerugian pada pihak lain. Keadaan ini membuat konflik akan muncul.

Pruitt dan Rubin (2004) secara teoritik menjelaskan lebih luas mengenai tiga model konflik. *Pertama*, model agresor-defendor yaitu salah satu pihak sebagai penyerang yang dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah tujuan yang mengakibatkannya terlibat di dalam konflik bersama pihak lainnya (defendor). Model agresor-defendor dapat dicontohkan oleh aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini. Teroris dalam melakukan aksinya ingin mencapai tujuan tertentu, seperti yang dilakukan Amrozi CS atau Ashari CS yang melakukan pemboman di berbagai daerah di Indonesia. Akibat pemboman tersebut mengakibatkan pihak lain ikut terlibat karena banyak warga Asing yang ikut menjadi korban. *Kedua*, model spiral-konflik yang diartikan sebagai eskalasi konflik karena buah dari suatu lingkaran aksi dan reaksi. Taktik-taktik yang dilakukan satu pihak menyebabkan pihak lain terdorong juga menggunakan taktik-taktik untuk memenangkan pertarungan. Proses ini membuat lingkaran konflik menjadi utuh dan mulai membentuk lingkaran berikutnya. Kerusakan di Indonesia seperti di Maluku, Poso, Sampit, dan Sambas memperlihatkan eskalasi konflik sudah mencapai pada model spiral-konflik. *Ketiga*, model perubahan struktural yang dapat terangkan sebagai sistem untuk menyelesaikan konflik ternyata membekaskan residu. Perubahan-perubahan psikologis yang menyertainya akibat proses ini adalah berbagai sikap dan persepsi negatif terhadap pihak lawan, lawan tidak dapat dipercaya, dan lawan dianggap memusuhi.

Model perubahan struktural dapat digunakan untuk menjelaskan konflik selepas runtuhnya orde baru. Ketika orde baru berkuasa memilih jalan represif untuk menyelesaikan masyarakat yang berkonflik. Penyelesaian tersebut ternyata tidak efektif. Setelah ruang kebebasan terbuka pada era reformasi, penyelesaian konflik dengan cara resepresif menyisakan residu. Konflik masih tertanam dalam masing-masing pihak sehingga menebarkan benih kebencian pada kelompok masyarakat yang terlibat konflik sebelumnya, yaitu munculnya sikap negatif, saling tidak percaya, dan menganggap orang lain menjadi musuh. Eskalasi ini semakin membesar maka konflik menjadi tak terhindarkan dengan ditandainya konflik horisontal di berbagai daerah di Indobesia.

G. Modal Sosial (*Sosial Capital*)

Modal sosial adalah keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Putnam dalam Narayan & Cassidy, 2001) atau "... totalitas sumber daya, aktual maupun virtual, yang berkembang pada individu maupun satu kelompok karena memiliki jaringan dalam periode tertentu atau hubungan yang informal yang saling membutuhkan dan menghormati (*the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of mutual acquaintance and recognition*) (Bourdiou dalam Narayan & Cassidy, 2001).

Putnam (dalam Narayan & Cassidy, 2001) mendeskripsikan modal sosial sebagai keterkaitan sosial yang menjadikan seseorang mampu melakukan

tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Putnam (Mohan & Mohan, 2002) juga menegaskan bahwa modal sosial adalah bagian dari kolektivitas, yaitu unsur-unsur dari kehidupan sosial: jejaring, norma, dan rasa percaya (*trust*).

McKenzie dan Harpham (2006) dengan mengabstrasikan pengertian modal sosial dari Putnam menjabarkan modal sosial sebagai:

- Jejaring sosial (*social networks*), jejaring pribadi yang bersifat sukarela,
- Keterlibatan dan partisipasi kewargaan dan penggunaan jejaring sipil,
- Identitas kewargaan lokal – rasa memiliki, solidaritas dan kesetaraan dengan anggota kelompok masyarakat,
- Prinsip timbal balik (resiprositas) dan nilai kooperasi, rasa berkewajiban untuk menolong orang lain dan percaya diri kala mendampingi,
- Dan kepercayaan (*trust*) dalam komunitas.

Pengertian dan definisi modal sosial di atas kemudian dapat dijadikan dasar meringkas pengertian modal sosial sebagai aspek jejaring sosial yang dimiliki individu maupun komunitas yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

H. Modal Sosial dan Solusi Konflik

Kasus-kasus konflik sosial di Indonesia dapat ditengarai karena gagalnya masyarakat Indonesia untuk membangun suatu interaksi sosial. Ketidakberhasilan dalam mengembangkan interaksi sosial tersebut disadari bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu negara yang amat beragam seperti suku, agama, bahasa, dan

budaya. Latar belakang keragaman tersebut memang menciptakan rawan konflik yang bisa mengakibatkan mudarnya modal sosial.

Melihat realitas itu maka mengembangkan modal sosial dapat dijadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia. Mengapa modal sosial bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi dan mencegah konflik sosial di Indonesia? Hermawanti dan Rinandari (2005) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat komunal yang mempunyai banyak nilai yang dapat menguatkan modal sosial. Modal sosial tersebut sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat. Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat karena memberikan pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi. Fukuyama (2002) menambahkan bahwa modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat yang diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural, seperti tradisi, agama, atau kebiasaan sejarah. Proses ini selanjutnya menumbuhkan komunitas spontan yang bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan sendiri ditentukan secara kultural yang dapat menghidupkan pengharapan berperilaku normal, jujur, dan kooperatif demi kepentingan bersama dalam suatu komunitas masyarakat.

Berdasarkan pandangan itu menjadi pijakan untuk menjelaskan bahwa modal sosial dapat digunakan guna meredam dan mengantisipasi konflik sosial di Indonesia. Modal sosial dapat menjadi perekat sosial. Ketika dalam suatu masyarakat telah tumbuh modal sosial yang baik, maka tidak akan terjadi konflik

sosial. Perbedaan-perbedaan kepentingan, masalah-masalah yang timbul karena tujuan berbeda, atau perebutan akses sumber daya dapat diselesaikan dengan cara bijaksana dan damai. Cara ini dapat ditempuh karena suatu masyarakat yang memiliki modal sosial telah memiliki pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi. Hal lain yang dimiliki modal sosial dalam suatu masyarakat yaitu adanya kepercayaan yang tumbuh pada komunitas yang diilandasi dengan kejujuran, kooperatif, dan tingkat kesadaran demi kepentingan bersama. Modal ini dapat mencegah munculnya konflik.

Ada beberapa daerah Indonesia telah berhasil memelihara modal sosial dengan baik sehingga dapat terhindar dari konflik. Salah satunya terdapat di Sipirok, Tapanuli Selatan. Desa ini memiliki tradisi goong royong dan peran aktif perempuan dalam menggarap sawah. Kebersamaan yang diwujudkan dalam gotong royong merupakan kekuatan masyarakat yang merupakan tradisi dan tetap dipelihara sampai sekarang. Kebersamaan ini diterapkan pada bidang pertanian. Desa Sipirok berhasil membuat kelompok tani Serasi sebagai wadah merealisasikan kebersamaan dalam mengelola tanah pertanian. Petani Sipirok mengerjakan lahan pertanian secara bergantian, tak ada pandang bulu dan batas agama, siapapun yang perlu bantuan akan dibantu oleh petani yang lain dengan ikhlas dan tanpa imbalan. Modal sosial seperti ini yang mampu menembus batas perbedaan keyakinan. Petani Sipirok saling menghormati dan toleransi, sehingga meski ada dua agama yang hidup berdampingan dapat hidup dengan damai dan jauh dari konflik (Arif, 2005).

Modal sosial juga dapat dijadikan sarana untuk mengatasi konflik yang lain. Shoemake (2005) mencatat bahwa di desa Idamdehe, Jailolo telah berhasil membangun sebuah sekolah. Pembangunan sekolah ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan, tetapi juga memulihkan kebersamaan kembali akibat kerusuhan di Maluku. Masyarakat di sana tumbuh kesadaran untuk berdamai dan berusaha memulihkan keadaan, salah satunya membangun sekolah yang hancur. Proses tersebut ternyata memperkuat ikatan antara anggota komunitas dan membantu mengembangkan modal sosial. Melalui kerja sama, tenggang rasa, suka rela, dan partisipatif melalui komunikasi, penduduk Idamdehe telah membuktikan bahwa keretakan atau permusuhan dalam suatu komunitas dapat dipulihkan melalui modal sosial.

Kenyataan modal sosial telah berhasil membawa warga Sipirok dan Idamdehe menghindari konflik, maka modal sosial perlu dikembangkan di daerah-daerah lain. Modal sosial tidak hanya berfungsi untuk mencegah konflik sosial yang bernuansakan agama, budaya, etnis, tetapi juga dapat dijadikan sarana untuk meredam konflik sosial yang mengandung unsur politis maupun ekonomis. Konflik sosial sebagai akibat dari pemilihan kepala daerah atau berebut sumber daya ekonomi dapat diatasi dengan mengembangkan modal sosial. Modal sosial dapat dijadikan peredam konflik karena perbedaan-perbedaan tujuan yang mengemuka itu dapat diatasi dengan rasa kebersamaan, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghargai. Bermodalkan unsur-unsur ini yang merupakan variabel

penentu bagi terciptanya modal sosial, maka selebar apapun jurang perbedaan akan dapat diselesaikan dengan damai.

Modal sosial sebagai solusi untuk mencegah atau mengatasi konflik bisa berhasil dengan baik apabila didukung multikulturalisme. Multikulturalisme memberikan sumbangan penting guna mengembangkan modal sosial karena melihat realitas keanekaragaman kultural di Indonesia. Modal sosial dapat dijalankan dengan tuntas apabila tumbuh kesediaan untuk mengakui adanya keberagaman. Sebaliknya tidak ada pengakuan terhadap keberagaman yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka modal sosial tidak dapat ditumbuhkan dengan semestinya.

Multikulturalisme menunjukkan peran yang amat penting bagi modal sosial sebagai alternatif mencegah konflik sosial, maka perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Berry, Poortinga, Segall, dan Dasen (1999) menjelaskan multikulturalisme sebagai konteks sosiopolitis yang memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri dan secara timbal balik mengembangkan sikap-sikap antar kelompok secara positif. Kebijakan-kebijakan multikulturalisme antara lain dapat diwujudkan melalui pluralisme. Yaqin (2005) menambahkan bahwa implementasi multikulturalisme melalui jalur pendidikan pada masyarakat. Pendidikan multikulturalisme ini menawarkan gagasan melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada keragaman yang ada di masyarakat menyangkut keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Budianta (2005) lebih

jauh menjelaskan tentang mensosialisasikan multikulturalisme melalui pendidikan yaitu kurikulum yang mencerminkan pluralitas masyarakat, termasuk masyarakat yang terpinggirkan; merajut ingatan kolektif masyarakat yang inklusif. Budianta secara detail mengungkap praktik multikulturalisme melalui jalur pendidikan formal (revisi kurikulum) dan informal (media massa, suri tauladan, berbagi pengalaman).

Pendidikan multikulturalisme ini dinilai strategis dan efektif karena dapat menghilangkan prasangka. Baron dan Byrne (1997) menyebut prasangka sebagai sikap negatif terhadap kelompok lain yang bisa menyebabkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda. Aronson, Wilson, dan Akert (2005) menjelaskan sikap sebagai kecenderungan perilaku yang terbangun dari aspek kognitif, afeksi, dan konasi. Berdasarkan pengertian ini maka sikap negatif yang melekat dan kuat akan menimbulkan tindakan diskriminasi yang dapat memicu terjadinya konflik. Selain prasangka, multikulturalisme dapat meminimalisir stereotipe. Myers (2002) menjelaskan stereotipe secara spesifik sebagai evaluasi negatif terhadap kelompok lain yang merupakan akibat dari kategori kognitif sederhana.

Ketika prasangka dan stereotipe masih hadir dalam diri seseorang atau kelompok maka akan menghambat multikulturalisme. Terhambatnya multikulturalisme berarti juga mengganggu terbangunnya modal sosial. Dengan demikian perlu mengembangkan pendidikan multikulturalisme sebagai pondasi untuk membangun modal sosial

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian eksploratif dan deskriptif-analitik. Dikatakan penelitian eksploratif, karena peneliti berusaha untuk mengeksplorasi permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik lebih mendalam dalam masyarakat sasaran. Dikatakan penelitian deskriptif analitik, karena hasil eksplorasi akan dideskripsikan serta dianalisis secara mendalam sesuai hasil temuan di lapangan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Jawa Timur, karena beberapa pertimbangan, yaitu : (1) Wilayah ini memiliki potensi konflik, namun konflik yang muncul tidak sampai pada eskalasi konflik yang tinggi. (2) Terdapat berbagai keragaman etnis, ideologi, dan budaya yang memungkinkan pergesekan politik. (3) Jawa Timur menduduki posisi jumlah penduduk terbesar se Indonesia, sehingga peluang keberpihakan dalam kepartaian juga cukup tinggi.

Dari hasil pemetaan potensi konflik dan tingginya modal sosial masyarakat di Jawa Timur, maka dipilihlah 5 lokasi penelitian, yaitu: Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, dan

Kabupaten Sampang. Kota Surabaya mewakili daerah metropolitan, Kota Malang mewakili budaya arek, Kabupaten Banyuwangi mewakili budaya osing dan pendalungan, Kabupaten Madiun mewakili budaya Mataraman, dan Kabupaten Sampang mewakili budaya masyarakat Madura.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Jawa Timur yang dapat memberikan informasi tentang modal sosial dan penyelesaian konflik politik, khususnya dari kantor Bakesbangpollinmas. Subjek penelitian dipilih dari sejumlah komunitas masyarakat yang terlibat langsung dalam proses politik di Jawa Timur.

Subyek / informan penelitian ini adalah orang yang mengerti / yang pernah terlibat dalam penyelesaian konflik politik di Jawa Timur. Subyek / informan berasal dari orang-orang Bakesbang Pol Linmas di tingkat propinsi dan juga kabupaten / kota yang telah ditentukan. Selain itu, orang-orang ini telah memiliki pengalaman baik dalam tugasnya sebagai staf di lembaga yang menangani masalah konflik dan atau tokoh masyarakat yang mengerti konflik politik yang pernah terjadi di Jawa Timur.

Berikut ini nama-nama dan identitas informan yang menjadi nara sumber khususnya sumber data primer penelitian ini. Para subyek / informan dalam penelitian ini yaitu:

1. EM, Bakesbang dan Pol Propinsi Jawa Timur

2. Kas, Bakesbangpol Kota Surabaya
3. SLT, dan DD Bakesbangpol dan Linmas Kota Malang
4. SJN, SKRN, ZAI, dari Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Sampang
5. AS, dan BS dari Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Madiun
6. SKM, Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi
7. GS dari tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota Dewan

Dipilihnya para subjek penelitian ini dikarenakan mereka adalah orang yang mengetahui baik langsung maupun tidak langsung kasus-kasus konflik politik yang terjadi serta mampu menggali modal sosial masyarakat sekitar kejadian konflik.

Setelah turun ke lapangan, dan menyesuaikan topik penelitian ini, maka kajian modal sosial lebih banyak bersumber dari ranah kebijakan. Oleh karena itu, subjek penelitiannya lebih terarah pada orang-orang yang menguasai atau berperan aktif dalam pengambilan kebijakan bidang politik. Oleh karena itu nara sumber pada penelitian ini lebih banyak dari masyarakat yang juga pegawai di kantor yang mengurus masalah itu.

D. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara mendalam (*Depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen ada di kantor Bakesbangpollinmas, media, ataupun publikasi lain yang

mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Posisi data primer dan data sekunder adalah saling melengkapi (*complementary*).

Wawancara dilakukan di masing-masing kota dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Pewawancara dalam penelitian ini telah belajar bagaimana melakukan wawancara yang baik dan mereka ini terdiri dari para mahasiswa yang sedang mengambil skripsi.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan di Universitas Airlangga dengan para nara sumber adalah pegawai Bakeskang / Bakesbang Pol Linmas yang telah ditunjuk oleh masing-masing kantor dari kabupaten/kota dan juga dari Bakesbangpolkinmas Propinsi Jawa Timur.

E. Analisis data

Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif terhadap sejumlah tema-tema yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam analisis ini fokus utamanya adalah jawaban akan pertanyaan penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data antara lain: 1. memetakan permasalahan penelitian dalam chart, 2. membuat verbatim wawancara dan menetapkan tematiknya, 3 mengkategorisasikan, membandingkan lintas kasus, dan mensintesis informasi ke dalam narasi., 4. mendalami masalah dan menganalisis ulang untuk melihat konsistensinya. 5. menyusun laporan sesuai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (data BPS Jatim tahun 2005), dan dengan kepadatan penduduk 794 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Timur sebesar 1,09 % per tahun.

Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung) (http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur).



Gambar 1. Peta Jawa Timur

Sumber: wikipedia

Ditinjau dari kondisi geografisnya, Jawa Timur terletak pada 111.0° hingga 114.4° Bujur Timur dan 7.12° hingga 8.48° Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencakup $46.712,80 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 38 pemerintahan kotamadya dan kabupaten, yaitu terdapat 29 kabupaten dan 9 kotamadya. Dari keseluruhan kota dan kabupaten tersebut, terdiri dari 615 kecamatan dan 8.413 desa/kelurahan yang menyebar dari barat yang berbatasan dengan Jawa tengah hingga ke timur di ujung Pulau Jawa. Di sebelah utara pulau ini dibatasi oleh bentangan Laut Jawa dan di belahan selatannya terbentang lautan luas yaitu Lautan Indonesia (Samudra Hindia). Sementara itu, di sebelah baratnya berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, sedangkan di sebelah timurnya dibatasi oleh Selat Bali.

Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan kota yang letaknya paling rendah, yaitu sekitar 2 meter di atas permukaan air laut. Sementara itu kota yang letaknya paling tinggi dari permukaan laut adalah Malang dengan ketinggian 445 m di atas permukaan laut.

Suhu udara kota-kota di Jawa Timur sangat bervariasi, mengingat wilayah ini banyak terdapat pegunungan. Di bagian dekat pantai suhu maksimum dapat mencapai $36^{\circ} - 37^{\circ} \text{ C}$ pada siang hari, sedang suhu minimum sekitar 22° C pada malam hari. Di daerah pegunungan dapat mencapai 25° C pada siang hari, dan 19° C pada malam hari. Suhu yang lebih rendah dari 15° C tidak dijumpai di daerah Jawa Timur. Temperatur terendah umumnya terjadi pada bulan Juni, sedangkan

temperatur tertinggi umumnya terjadi pada bulan Oktober (http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur).

Kondisi topografi wilayah Propinsi Jawa Timur sangat bervariasi, namun secara umum lebih banyak didominasi oleh adanya topografi pegunungan. Hal ini mengingat Jawa Timur merupakan lintasan pegunungan Selatan, dengan elevasi permukaan tanah maksimum + 3637 m (puncak gunung Mahameru) yang terletak di daerah perbatasan antara Kabupáten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang.

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami di Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara Pulau Jawa dan di pesisir selatan Pulau Madura. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Selain Madura, ada juga Suku Tengger. Konon suku ini adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit yang menyebar dan tinggal di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Di ujung Timur Jawa Timur juga terdapat Suku Osing yang tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku terakhir yang lain adalah orang Samin tinggal yang hidup di pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk asli di atas, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan dan

mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan orang keturunan Arab. Mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga ada yang tinggal di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Selain suku bangsa di atas, di Jawa Timur juga tinggal sejumlah ekspatriat dari negara lain. Hal ini sangat mungkin terjadi karena terdapat sejumlah industri yang berkembang di Jawa Timur.

Ditinjau dari karakteristik budaya dan dialeknnya, maka masyarakat Jawa Timur dapat terbagi atas beberapa wilayah: yaitu (a) masyarakat dengan budaya dan dialeks *mataraman*, (b) masyarakat dengan budaya dan dialek *Samin*, (c) masyarakat dengan Budaya dan dialek *Arek*, (d) masyarakat dengan budaya dan dialek Madura, (e) masyarakat dengan budaya dan dialek Tengger, (f) masyarakat dengan dialeks dan budaya *osing*, dan (g) masyarakat dengan budaya dan dialeks *madura*.

Masyarakat *mataraman* mendiami daerah Madiun hingga Kediri dan Blitar. Masyarakat *samin* mendiami daerah lamongan hingga Tuban dan Bojonegoro. Masyarakat budaya *arek* mendiami Gresik, Mojokerto, Jombang, Malang, dan Pasuruan. Masyarakat Tengger sangat khusus, karena masyarakat ini adalah masyarakat yang berasal dari keturunan Kerajaan Majapahit dan hanya mendiami kawasan di sekitar Gunung Bromo.

Masyarakat dengan budaya *Osing* mendiami kawasan di beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi. Sementara itu budaya dan bahasa Madura dapat dijumpai di daerah pulau Madura dan sejumlah daerah di sepanjang tapal kuda. Budaya dan dialeks *madura* yang di daerah tapal kuda ini dikenal dengan

sebutan masyarakat *pendalungan*. Pendalungan adalah istilah untuk menggambarkan sekelompok masyarakat yang menggunakan bahasa dan budaya madura, namun sebenarnya mereka ini hanyalah keturunan Madura atau keturunan Jawa yang selalu berinteraksi dengan masyarakat keturunan madura tersebut.

Kalau dicermati lebih jauh, maka sebenarnya masyarakat Madura yang murni banyak dijumpai di dua wilayah kabupaten yaitu kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Sementara itu untuk masyarakat Pamekasan dan Sumenep, meskipun menggunakan bahasa Madura, tampak bahwa pengaruh budaya Mataraman juga sangat terasa, terutama apabila dilihat dari tingkatan dalam berbahasa.

Mengingat luas dan banyaknya kultur serta karakteristik masyarakat Jawa Timur, dalam penelitian ini dipilihlah lokasi yang setidaknya mewakili daerah dan budaya yang beragam tersebut. Dalam penelitian ini ada 5 kabupaten atau kota yang dijadikan lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, kabupaten Sampang, Kota Malang dan Kota Surabaya.

Dipilihnya Kabupaten Madiun setidaknya diharapkan mampu mewakili masyarakat Mataraman serta adanya pertimbangan bahwa Madiun pernah mengalami konflik di jaman PKI tahun 1948. Sejak peristiwa 1948, tidak terjadi lagi konflik sosial di masyarakat, dan bahkan di saat era reformasi, masyarakat ini sangat tenang dan tidak mengalami pergolakan.

Kabupaten Banyuwangi dipilih karena masyarakat ini setidaknya mewakili masyarakat Osing. Selain itu Banyuwangi pernah mengalami konflik sosial politik di masyarakat beberapa kali, sejak isu santet hingga pemilihan bupati.

Kabupaten Sampang dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat sampang merupakan daerah dengan kekhasan sebagai masyarakat Madura. Daerah ini pernah mengalami kasus konflik yang melibatkan masyarakat luas disaat pembangunan Waduk Nipah tahun 1993, Pelaksanaan Pemilu ulang Tahun 1997, penolakan bupati terpilih Fadilah Budiono, dan terakhir pemilihan ulang saat Pilkada untuk memilih gubernur di Jawa Timur tahun 2008.

Kota Malang dipilih sebagai lokasi dalam penelitian ini mengingat Malang adalah mewakili budaya Arek. Malang juga merupakan kota besar kedua di Jawa Timur. Selain itu Malang hingga saat ini tidak banyak mengalami pergolakan politik sebagai akibat konflik politik di masyarakatnya.

Kota Surabaya dipilih dalam kajian ini karena Surabaya merupakan kota metropolitan dan sekaligus pusat pemerintahan di Jawa Timur. Asumsinya apabila ada kebijakan maupun gejolak yang terjadi di pusat pemerintahan ini, maka di kabupaten atau kota yang lain dalam satu propinsi akan mengalami dampak.

Kota Surabaya juga tidak pernah mengalamai konflik politik besar, meskipun potensi tersebut ada. Ketenangan dan dinamika inilah yang mendorong Kota Surabaya serta 4 kota atau kabupaten lainnya untuk dijadikan sampling

lokasi penelitian. Berikut ini gambaran masing-masing kota atau kabupaten dalam penelitian ini.

B. Gambaran Lokasi Sampling Penelitian

1. Kabupaten Madiun



Lambang Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas 1.009,05 km². Kabupaten ini memiliki 15 kecamatan yang membentang mulai dari sisi timur, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sisi utara berbatasan dengan kabupaten Ngawi, dan sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Magetan. Kelima belas kecamatan tersebut adalah: Balerejo, Dagangan, Dolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kare, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Sawahan, Wonoasri, dan Wungu yang terbagi atas 206 desa dan kelurahan

Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan

bergelombang, sedangkan bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Liman.

Ibukota kabupaten ini adalah Madiun, namun sebagian besar gedung-gedung pemerintahan berada di kota Caruban. Dipilihnya ibukota ini karena secara historis, Madiun sudah menjadi *kadipaten* sejak pemerintahan Mataram sebelum Madiun dipecah menjadi daerah Kota dan Kabupaten.

Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, Surabaya-Ponorogo sampai Pacitan, dan Surabaya-Magetan. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kota kecamatan yang cukup signifikan dalam pemerintahan Kabupaten Madiun adalah: Caruban, Saradan, dan Balerejo. Ketiga daerah ini berada di sebelah timur kota Madiun.

Potensi yang menonjol saat ini adalah pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, durian, rambutan dan produk hasil hutan dan produk olahan lain seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya.

Dari berbagai sumber sejarah dan situs internet, Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharam, tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568 / Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Be - Jawa Islam.

Berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama

baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten = tempat Rekso Gati)

Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang Bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasaan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518 - 1568. Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590.

Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur (Panembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah. Bupati inilah selaku senopati manggalaning perang yang memimpin prajurit-prajurit Mancanegara Timur.

Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaja dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan di sekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun).

Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaja dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaja dan diboyong ke istana Mataram di Plered (Jogjakarta) sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Maschi nama "Purbaya" diganti menjadi "Madiun".

2. Kabupaten Banyuwangi



Lambang Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur. Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen, dengan puncaknya Gunung Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), keduanya adalah gunung api aktif.

Ditinjau dari posisinya, kabupaten Banyuwangi berada pada koordinat $7,43^{\circ} - 8,46^{\circ}$ LS dan $113,53^{\circ} - 114,38^{\circ}$ BT. Karena dikitari oleh pegunungan,

maka daerah ini cenderung subur dan banyak menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan.

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam yakni Taman Nasional Meru Betiri. Selain itu ada juga Pantai Sukamade yang merupakan kawasan pengembangan penyus dan diujung Banyuwangi ada Semenanjung Blambangan yang juga terdapat cagar alam Taman Nasional Alas Purwo.

Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Oleh karena itu tidak heran jika Banyuwangi memiliki pelabuhan perikanan yang sangat besar di Muncar.

3. Kabupaten Sampang



Lambang Kabupaten Sampang

Letak daerah Kabupaten Sampang berada pada koordinat 1130 08⁰ - 1130 39⁰ Bujur Timur, dan 060 05⁰ - 070 13⁰ Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Pamekasan di bagian timur, Selat

Madura di bagian selatan, serta Kabupaten Bangkalan di bagian barat. Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan (DDA 2005 menggunakan 12 Kecamatan) dimana terdapat 180 Desa dan 6 Kelurahan yang luas wilayahnya mencapai 1233,30 km². Kabupaten Sampang meliputi 12 kecamatan, yaitu: Banyuates, Camplong, Jrengik, Kedungdung, Ketapang, Omben, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, dan Torjun

Wilayahnya juga mencakup juga Pulau Kambing, yang berada di selatan Pulau Madura. Dataran di Kabupaten Sampang berbukit-bukit dan berbatu kapur, sehingga untuk pertanian padi agak susah. Karena itu tanaman pertanian yang sangat memungkinkan untuk ditanam di wilayah ini adalah tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, seperti: jagung, kedelai, dan tanaman keras untuk tumbuhan yang tahan air. Di musim kemarau, wilayah Kabupaten Sampang merupakan areal yang kering, karena itu wilayah ini cocok untuk tanaman yang tidak butuh air.

4. Kota Malang



Lambang Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan *kota pelajar*.

Kota Malang dikenal juga sebagai Kota Dingin, karena memiliki letak geografis yang dikelilingi pegunungan, antara lain Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Kawi-Panderman, Gunung Bromo-Semeru. Pemerintahan Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan yaitu : Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun.

Wilayah cekungan Malang telah sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan percandian dan arca-arca, bekas-bekas pondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan.

Nama "Malang" berasal dari Candi Malang Kucecwara, sebuah candi yang terletak di kaki Gunung Buring, di timur kota Malang. Candi tersebut dibangun pada abad ke-15.

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya *Ijen Boulevard* dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.

Pada tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang

beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Penduduk Kota Malang sebagian besar terdiri dari Suku Jawa. Meskipun demikian juga terdapat suku minoritas seperti: suku Madura, keturunan Arab, dan keturunan Tionghoa.

Agama mayoritas penduduk Kota Malang adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain: Masjid Jami' (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Maria Bunda Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Ponpes Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muhsyadi, dan juga adanya pusat pendidikan Nasrani berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa Madura.

Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut Boso Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya *Malang* menjadi *Ngalam*, *bakso* menjadi *oskab*, dan contoh lain seperti saya bangga arema menang-ayas bangga

arema nganem. Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

5. Kota Surabaya



Lambang Kota Surabaya

Surabaya terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di Selatan, serta Kabupaten Gresik di Barat. Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 - 50 m diatas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas. luas wilayah kota surabaya adalah 374,36 km².

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat

bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur.

Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah.

Ditinjau dari sejarahnya, Kota Surabaya dulunya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit, yakni di muara Kali Mas. Bahkan hari jadi Kota Surabaya ditetapkan sebagai tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukan kerajaan Mongol utusan Kubilai Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai BOYO (buaya/bahaya) dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai ikan SURO (ikan hiu/berani), jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya.

Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota wali sanga, Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di daerah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kesultanan Demak.

Menyusul runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram: diserbu Panembahan Senopati tahun 1598, diserang besar-besaran oleh Panembahan Seda ing Krapyak tahun 1610, diserang Sultan Agung tahun 1614. Pemblokiran aliran Sungai Brantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Tahun 1675, Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya didepak VOC pada tahun 1677.

Dalam perjanjian antara Paku Buwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC.

Pada zaman Hindia-Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibukota Karesidenan Surabaya yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kotamadya (*Gemeente*). Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Sejak itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia-Belanda setelah Batavia.

Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Sampai tahun 1920-an, tumbuh pemukiman baru seperti: daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Pada tahun 1917 dibangun fasilitas pelabuhan modern di Surabaya.

Tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara Sekutu pada tanggal 17 Mei 1944.

Setelah Perang Dunia II usai, pada 25 Oktober 1945, 6000 pasukan Inggris-India yaitu Brigade 49, Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka, tetapi milisi dan lebih dari 20000 pasukan Indonesia menolak. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tercapai persetujuan

antara Bapak Suryo, Gubernur Jawa Timur dengan Brigjen Mallaby bahwa pasukan Indonesia dan milisi tidak harus menyerahkan senjata mereka. Sayangnya terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya dengan markas tentara Inggris di Jakarta yang dipimpin Letnan Jenderal Sir Philip Christison.

Tanggal 27 Oktober 1945, jam 11.00 siang, pesawat Dakota AU Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata. Para pimpinan tentara dan milisi Indonesia marah waktu membaca selebaran ini dan menganggap Brigjen Mallaby tidak menepati perjanjian tanggal 26 Oktober 1945.

Tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia dan milisi menggempur pasukan Inggris di Surabaya. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, Brigjen Mallaby meminta agar Presiden RI Soekarno dan panglima pasukan Inggris Divisi 23, Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorn untuk pergi ke Surabaya dan mengusahakan perdamaian.

Tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wapres Mohammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin Harahap bersama Mayjen Hawthorn pergi ke Surabaya untuk berunding. Pada siang hari, 30 Oktober 1945, dicapai persetujuan yang ditanda-tangani oleh Presiden RI Soekarno dan Panglima Divisi 23 Mayjen Hawthorn. Isi perjanjian tersebut adalah diadakan perhentian tembak menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya secepatnya. Mayjen Hawthorn dan ke 3 pimpinan RI meninggalkan Surabaya dan kembali ke

Jakarta. Pada sore hari, 30 Oktober 1945, Brigjen Mallaby berkeliling ke berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal persetujuan tersebut. Saat mendekati pos pasukan Inggris di gedung Internatio, dekat Jembatan merah, mobil Brigjen Mallaby dikepung oleh milisi yang sebelumnya telah mengepung gedung Internatio.

Karena mengira komandannya akan diserang oleh milisi, pasukan Inggris kompi D yang dipimpin Mayor Venu K. Gopal melepaskan tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi. Para milisi mengira mereka diserang / ditembak tentara Inggris dari dalam gedung Internatio dan balas menembak. Seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith melemparkan granat ke arah milisi Indonesia, tetapi meleset dan malah jatuh tepat di mobil Brigjen Mallaby.

Granat meledak dan mobil terbakar. Akibatnya Brigjen Mallaby dan sopirnya tewas. Laporan awal yang diberikan pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris di Jakarta menyebutkan Brigjen Mallaby tewas ditembak oleh milisi Indonesia.

Letjen Sir Philip Christison marah besar mendengar kabar kematian Brigjen Mallaby dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya.

Pada tanggal 9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris, tetapi ultimatum ini tidak diindahkan. 10 November 1945, Inggris mulai membom Surabaya dan perang sengit berlangsung terus menerus selama 10 hari. Dua

pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan RI dan salah seorang penumpang Brigadir Jendral Robert Guy Loder-Symonds terluka parah dan meninggal keesokan harinya. 20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, milisi dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur.

Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran tanggal 10 November 1945 tersebut hingga sekarang dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Penduduk Surabaya umumnya Suku Jawa. Dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, Suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih *keras* dan *egaliter*. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari kraton yang dipandang sebagai *pusat* budaya Jawa. Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku seperti Madura, Arab, Tionghoa, dan ekspatriat lain yang bertugas di Surabaya.

Kota Surabaya terdiri atas 31 kecamatan. Berikut adalah daftar kecamatan di Surabaya yang dibagi dalam 5 wilayah: Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gununganyar, Jambangan,

Karangpilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo.

C. Pola Konflik Politik di Masyarakat Jawa Timur

Pola konflik politik di masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersistematisasi, berawal dari kasus konflik internal partai, kemudian meningkat menjadi konflik antar partai politik. Konflik politik tidak terjadi secara tiba-tiba, dan serta-merta.

Dari sejumlah kasus yang dikumpulkan di lapangan, potensi konflik di Jawa Timur cukup bervariasi, dan umumnya konflik itu bersifat latent, serta memiliki sumber penyebab konflik yang berupa motif kekuasaan baik dari internal partai sendiri maupun konflik dari luar parta. Kalau pun sampai menjadi konflik politik tersebut bersifat manifes, dan dalam eskalasi tinggi, maka hal itu lebih disebabkan karena pengaruh dari luar wilayah Jawa Timur.

Pandangan ini muncul seperti yang dinyatakan oleh nara sumber dari Surabaya yang menyatakan bahwa:

Untuk peta konflik yang terjadi baik yang terjadi di Jawa Timur maupun yang ada di kota Surabaya, sebenarnya jika kita melihat secara langsung, secara kasat mata kita tidak akan bisa melihat bagaimana gambaran konflik yang sebenarnya terjadi, dalam artian konflik politik internal yang terjadi dalam suatu partai merupakan bagian dari privasi masing-masing partai dimana hal tersebut tidak untuk dikonsumsi secara public. Sedangkan untuk kasus politik eksternal yang terjadi, kita pun

jarang melihat kasus-kasus tersebut berkembang menjadi sebuah permasalahan yang besar, jika pun memang terjadi konflik eksternal, hal tersebut akan segera ditangani sebelum konflik tersebut memberikan dampak lebih. Yang perlu kita ketahui justru bahwa keberadaan partai politik yang ada di Indonesia itu dibentuk dari atas, bukan dari bawah, misalkan saja semacam LSM ataupun organisasi masyarakat, jika mereka mampu berkembang pesat di suatu wilayah maka ada kemungkinan akan membuka cabang di Kabupaten kota yang lain, jadi dibentuk dari bawah ke atas. Hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan Partai Politik dimana jajarannya dibentuk dari tingkat atasnya dulu baru kemudian jajaran tingkat bawah.

Pola konflik politik yang terjadi di Kota Malang dan Kabupaten Madiun tidak jauh berbeda dengan pola konflik yang terjadi di kota Surabaya. Di Madiun hampir tidak pernah ada konflik politik yang berkepanjangan, hal itu bisa terjadi dikarenakan Bupati Madiun mengajak para LSM (Lembaga Swasembada Masyarakat), Muspida untuk saling bekerja sama dengan membuat BST (Bakti Sosial Terpadu). Bupati membawahi 261 desa yang terdapat di Madiun. Bupati berusaha memberdayakan masyarakat untuk mengakomodir berbagai hal yang bisa menjadi rawan konflik. Simpul-simpul komunitas masyarakat pedesaan sangat diberdayakan oleh pemerintah untuk antisipasi menanggulangi dalam konflik. Itu bisa dibentuk dari aparat pemerintah yang bekerjasama atau bersinergi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Para pemimpin daerah mempunyai trik-trik agar konflik tidak terjadi di dalam kabupaten madiun. Salah satunya yaitu memberdayakan perilaku aparat agar tidak arogan (intinya bisa melayani masyarakat sebaik mungkin, tidak seenaknya). Selain itu bupati tiap tahun memberikan anggaran untuk memberdayakan masyarakat agar ekonominya

lebih baik juga diadakan semacam pertemuan rutin dalam pelaksanaan mendengarkan stake-holder baik itu LSM, Ormas, tokoh wanita dengan topik yang berbeda setiap bulannya. Pertemuan yang sudah dibahas harus rutin. Dalam pertemuan rutin tiap bulan itu tidak hanya dibahas hal-hal yang serius saja seperti pidato, tetapi juga diadakan campursari, makan malam hingga kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Pimpinan daerah mengkondisikan masyarakat di pedesaan sehingga mereka bisa membuat masyarakat tidak melakukan hal yang tidak sewajarnya. Bupati benar-benar memberikan anggaran agar masyarakat dikondisikan agar sungkan kepada pemerintah. Trik lainnya yaitu mencontohkan perilaku aparat, pejabat, sesuai norma-norma atau batasan sehingga dapat dibuktikan tidak terjadi konflik. Dalam hal ini, bupati terjun langsung ke masyarakat (ikut menanam padi, membersihkan jalan) agar masyarakat bisa sungkan dan akhirnya bisa mengurangi rawan konflik.

Menurut sumber dari informan yang berasal dari Bakesbangpollimas Kabupaten Madiun, dinyatakan seperti berikut:

Konflik di Jawa timur yang pertama secara umum tidak terlalu menonjol hanya kepentingan-kepentingan perseorangan yang memasukkan ke institusi agar harapan perorangan itu bisa merupakan suatu format yang besar padahal itu hanya mewakili dia sendiri. Ya secara umum seperti itu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pola konflik politik yang terjadi di Kabupaten Madiun lebih disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, kesalahan penafsiran aturan terkait dengan perhitungan suara dan kedua, adanya konflik

internasional partai politik akibat rebutan pendukung untuk calon wakil rakyat. Kalau dulu nomor urut menentukan sekarang ada aturan lain, yaitu pemilih terbanyak.

Sementara itu pola konflik politik di Kota Malang saat diadakannya pemilu tahun 2008 hanyalah rebutan dukungan baik secara internal partai maupun rebutan pendukung antar partai.

Saat masa kampanye banyak parpol yang berlomba mengkampanyekan calonnya masing – masing dengan cara membawa bendera partai dan menempelkan foto calon pada tiang listrik, tembok, pohon, dll. Masing-masing pendukung partai menempelkan poster kemudian pendukung partai yang lain menempelkan poster di tempat yang sama juga, lama kelamaan membuat (tembok, pohon, tiang listrik) atau tempat yang ditempelin poster tersebut makin penuh yang akhirnya foto calon masing-masing pendukung menjadi tertumpuk-tumpuk oleh foto calon anggota yang lain. Hal ini lah yang menyebabkan massa pendukung masing-masing partai menjadi tidak terima dan memicu konflik yang terjadi di Malang pada saat pemilu tahun 2009 bulan April.

Berbeda dengan di tiga wilayah pemerintahan di atas, kasus-kasus konflik yang selama ini ditengarai memiliki potensi besar untuk konflik yang manifes dan memiliki eskalasi konflik yang tinggi adalah Kabupaten Sampang. Data lapangan menunjukkan bahwa di sampang memang pernah terjadi konflik yang cukup besar. Polanya ada yang konflik internal partai karena sama-sama ingin mencari pendukung. Kalau pun itu konflik tersebut melibatkan partai lain (konflik eksternal), dari kasus pemilu hingga pemilihan gubernur, penyebabnya semata-mata karena konflik itu untuk mencari pendukung. Hal ini dinyatakan dalam diskusi dan wawancara dengan nara sumber dari Sampang seperti berikut:

Untuk di Kabupaten Sampang ini dek ya, kalau gak salah pernah terjadi konflik politik yang cukup heboh, kira-kira terjadi di tahun 97, pada pemilu 97 sempat terjadi bakar-bakaran, gedung golkar dibakar, kantor

kecamatan dibakar... Kotak-kotak pun dibakar, kantor polisi pun dibakar...

Pada tahun itu terjadi kasus ketidakpuasan antara pendukung partai Golkar dan PPP. Dalam hal ini nilai kesamaan ideologi politik dilawankan dengan ideologi penguasa yang tercermin dalam partai Golkar. Sementara pada pemilu ini PDI tidak dimusuhi, karena waktu pemilu tersebut juga menjadi partai yang menjadi lawan partainya pemerintah. Kasus konflik akhirnya berlanjut di Pemilu tahun 1999. Wawancara dengan nara sumber dari Sampang dinyatakan bahwa:

Akhirnya tahun 99 ada pemilu lagi terus disitulah terjadi reformasi pak Harto lengser itu sempat masyarakat Sampang betul-betul marah...Sampai 99 pemilu diulang, di Kabupaten Sampang itu, satu-satunya kabupaten yang mungkin pemilihan umumnya diulang, mungkin menjadi perhatian dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia..

Sedangkan ketika terjadi pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008 kasus sampang sampai diulang karena para pendukung tidak puas terhadap hasilnya. Kalaupun itu dikatakan konflik bukan karena tokohnya yang konflik, tapi para pendukungnya ingin menang.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pola konflik yang terjadi di Sampang berbeda dengan di Surabaya, Malang dan Madiun. Sampang cenderung lebih terbuka dan menunjukkan eskalasi konflik horisontal utamanya ketika dilaksanakannya pemilihan umum baik untuk memilih wakil partai politik maupun untuk memilih pemimpin lokal.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Lakpesdam NU Jawa Timur dan the WAHID Institute di Hotel PKPRI Jl. Trunojoyo 45 Sampang Jawa Timur, menunjukkan kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di

Sampang antara lain lebih disebabkan pada tarik ulur kepentingan politik dan elit politik. Konflik itu bisa murni terkait ideologi politik agamawan, maupun konflik eksternal yang menjadi ganjalan bagi agamawan, sehingga berimbas pada hubungan kehidupan sosial kemasyarakatan. ([http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=96/hl=id/Konflik Pilkada Sampang Jawa Timur Akibat Kepentingan Elit Parpol](http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=96/hl=id/Konflik_Pilkada_Sampang_Jawa_Timur_Akibat_Kepentingan_Elit_Parpol)).

Sementara itu, pola konflik politik yang hampir sama dengan Kabupaten Sampang, karena yang sifatnya manifes dan cenderung bereskalasi luas adalah di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten yang terletak di ujung timur Jawa Timur ini sempat mengalami beberapa kali konflik politik baik yang ditandai dengan adanya isu dukun santet hingga pemilihan bupati dan usaha melengserkan bupati terpilih dari jabatannya.

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Kabupaten Banyuwangi ditunjukkan bahwa pola konflik sebenarnya tidak lepas dari proses pemilihan bupati, ketidakpuasan elit politik yang berada di legislatif yang tidak rela calonnya kalah, dan melebarnya konflik politik akibat isu-isu politik seperti isu gender, banyaknya pemilih dari luar, pluralitas identitas, dan membengkaknya jumlah pemilih. Dari kasus-kasus ini dapat dilihat bahwa konflik internal partai dan konflik eksternal antar partai secara implisit tampak. Utamanya dari kekalahan partai besar terhadap calon bupati yang kalah.

Penelitian yang dilakukan Irtanto juga menunjukkan analisis yang hampir sama. Konflik politik lebih disebabkan karena efek pemilu. Dalam kesimpulannya

penelitian Irtanto yang berjudul “Konflik Elit Politik Lokal Dalam Proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi” menyimpulkan bahwa konflik disebabkan oleh faktor maturitas elit politik rendah dan hanya cenderung mementingkan kepentingan ekonomi politik http://www.balitbangiatim.com/jurnal_mainIsi_detail.asp?id_jurnal=13&id_isi=22&hal=1

Hasil *Focus Group Discussion* yang dilakukan peneliti dengan mengundang para nara sumber dari BakesbangPollinmas, ditunjukkan bahwa *power sharing* antara legislatif dengan Bupati / Walikota perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena selama ini bila *power sharing* tidak dilakukan secara proporsional dan rasional, hal itu dapat menjadikan sumber konflik yang menyebabkan konflik menjadi manifes dan menggunakan basis massa untuk menggolkan tujuannya.

Kasus konflik di Kabupaten Banyuwangi yang cenderung menggoyang posisi Bupati yang menang, mencerminkan bahwa partai dominan idealnya juga bisa memenangkan pemilihan bupati tersebut. Namun karena pemilihan Bupati adalah secara langsung, maka tidak ada korelasi yang signifikan dalam kasus ini partai pemenang pemilu juga bisa menang dalam pemilihan bupati.

Hasil FGD lain yang dilakukan menunjukkan bahwa pola konflik yang ada di Jawa Timur, bila dilihat dari penyebabnya adalah antara lain:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang harus diakomodasi daerah. Misalnya RUU APP, kenaikan BBM, BLT,

2. Pembelajaran masyarakat terkait dengan otonomi daerah. Karena adanya mispersepsi dalam mengartikan otonomi daerah,
3. Unjuk rasa kelompok masyarakat yang diakibatkan karena kurang adanya akomodasi kepentingan kelompok masyarakat, dan isu-isu nasional yang berkembang di daerah (misalnya isu SARA),
4. Pilkada, menjadi salah satu penyebab yang lain, terutama bila a. Penetapan pemimpin formal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan adanya budaya Parpol yang tidak siap kalah, dan
5. Penyebab lainnya adalah karena konflik tanah, penyebabnya adalah pembebasan tanah rakyat (misalnya, di Lumajang utk lapangan terbang, di Madiun untuk jalan tol)

Dari kasus-kasus konflik politik di atas, dan penyebabnya dapat dipolakan bahwa antar daerah memiliki pola konflik yang berbeda. Perbedaan tampaknya disebabkan oleh kekhasan daerah, terutama yang budaya masyarakat setempat dalam melihat masalah kekuasaan dan ekonomi politik. Meskipun demikian, umumnya pola dan bentuk konflik politik yang terjadi di Jawa Timur cenderung konflik laten, dan kalau pun harus konflik terbuka masalahnya tidak berada semata-mata berhubungan dengan perbedaan ideologi politik melainkan lebih karena adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (deprivasi relatif) seperti alasan ekonomi.

Apabila diteorikan dengan tahapan konflik yang ditulis oleh Pondy (1969) maka tahapan konflik di Jawa Timur masuk dalam tahapan proses`laten yang

masih perseptual dan adanya perasaan permusuhan ketika kepentingan terhambat.

- .. Konflik yang manifes baru akan dilakukan ketika kesadaran politik warga rendah dan masyarakat mudah diprovokasi.

D. Pola Penyelesaian Konflik Politik Masyarakat Jawa Timur

Penyelesaian konflik politik di Jawa Timur pada umumnya bisa secara preventif, dan bisa pula diselesaikan secara langsung di saat terjadi konflik. Penyelesaian konflik politik yang preventif dilakukan dengan deteksi dini terhadap gejala yang terjadi di lapangan. Upaya ini dilakukan karena semua menyadari bahwa konflik horisontal yang melibatkan massa dan melalui demonstrasi akan memberikan dampak negatif bila sampai terjadinya chaos. Karena umumnya konflik politik berbuntut pada terjadinya kerumunan.

Sementara itu penyelesaian konflik yang terjadi secara langsung dilakukan dengan melakukan pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup oleh petugas dan Satpol PP. Pengamanan terbuka ini adalah pengamanan dengan petugas yang berseragam, sedangkan pengamanan tertutup adalah pengamanan dengan petugas tanpa menggunakan seragam. Petugas dalam hal ini lebih berperan sebagai intelijen.

Dalam penyelesaian konflik politik yang terbuka, peran petugas di lapangan sangat penting. Bila petugas tidak antisipatif dan salah perhitungan chaos akan sangat mungkin terjadi, terlebih lagi bila tuntutan masa begitu berhubungan dengan masalah keadilan dan juga berhubungan dengan hak

hidupnya. Kasus yang terjadi di Nipah menunjukkan adanya kesan bahwa .. diantara masyarakat dan pemerintahannya terjadi ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan itu ditunjukkan dengan melawan pemerintahnya. Bahkan dalam kasus tersebut sampai terjadi korban jiwa. Dari kasus ini, masalah kepercayaan memerlukan perhatian khusus dalam antisipasi munculnya konflik.

Di Madiun hampir tidak pernah ada konflik politik yang berkepanjangan, hal itu bisa terjadi dikarenakan Bupati Madiun mengajak para LSM (Lembaga Swasembada Masyarakat), Muspida untuk saling bekerja sama dengan membuat BST (Bakti Sosial Terpadu). Bupati membawahi 261 desa yang terdapat di Madiun. Bupati berusaha memberdayakan masyarakat untuk mengakomodir berbagai hal yang bisa menjadi rawan konflik. Simpul-simpul komunitas masyarakat pedesaan sangat diberdayakan oleh pemerintah untuk antisipasi menanggulangi dalam konflik. Itu bisa dibentuk dari aparat pemerintah yang bekerjasama atau bersinergi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Para pemimpin daerah mempunyai trik-trik agar konflik tidak terjadi di dalam Kabupaten Madiun. Salah satunya yaitu memberdayakan perilaku aparat agar tidak arogan (intinya bisa melayani masyarakat sebaik mungkin, tidak seenaknya). Selain itu bupati tiap tahun memberikan anggaran untuk memberdayakan masyarakat agar ekonominya lebih baik, juga diadakan semacam pertemuan rutin dalam pelaksanaan mendengarkan stake-holder baik itu LSM, Ormas, tokoh wanita dengan topik yang berbeda setiap bulannya. Pertemuan yang sudah dibahas harus rutin. Dalam pertemuan rutin tiap bulan itu tidak hanya

dibahas hal-hal yang serius saja seperti pidato, tetapi juga diadakan campursari .. ,makan malam hingga kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Pimpinan daerah mengkondisikan masyarakat di pedesaan sehingga mereka bisa membuat masyarakat tidak melakukan hal yang tidak sewajarnya. Bupati benar-benar memberikan anggaran agar masyarakat dikondisikan agar sungkan kepada pemerintah. Trik lainnya yaitu mencontohkan perilaku aparat ,pejabat ,sesuai norma-norma atau batasan sehingga dapat dibuktikan tidak terjadi konflik. Dalam hal ini, bupati terjun langsung ke masyarakat (ikut menanam padi, membersihkan jalan) agar masyarakat bisa sungkan dan akhirnya bisa mengurangi rawan konflik. menurut Narfa sumber dari Surabaya, dinyatakan bahwa:

Pemerintah sendiri cukup turut andil untuk menjaga stabilitas kerukunan antar partai. Hal tersebut dapat kita lihat dimana pemerintah juga memfasilitasi adanya sebuah forum antar partai, misalkan saja dalam setahun sekali pemerintah kota mengadakan seminar pemberdayaan partai politik dengan tujuan adanya kumpul bersama antar partai, sebagai wadah untuk saling memberikan pendapat, dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang baik antar partai. Jadi dengan kata lain, walaupun antara satu partai dengan partai yang lain bisa dikatakan sebagai saingan dalam dunia poitik namun diharapkan persaingan berjalan secara sehat tanpa ada kecurangan... Hal yang lain juga tidak terlepas dari peranan pemimpin partainya itu sendiri mbak, misalkan saja yah mbak.... Untuk partai Demokrat, itu sebenarnya bukan semata-mata karna nama parti itu sendiri, tapi juga kharisma daripada Pak SBY itu sendiri, yang membuat orang itu akhirnya percaya dengan system pemerintahan yang beliau pegang... Pemerintah sendiri cukup turut andil untuk menjaga stabilitas kerukunan antar partai. Hal tersebut dapat kita lihat dimana pemerintah juga memfasilitasi adanya sebuah forum antar partai, misalkan saja dalam setahun sekali pemerintah kota mengadakan seminar pemberdayaan partai politik dengan tujuan adanya kumpul bersama antar partai, sebagai wadah untuk saling memberikan pendapat, dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang baik antar partai. Jadi dengan kata lain, walaupun antara satu partai dengan partai yang lain bisa dikatakan sebagai saingan dalam dunia poitik namun diharapkan

persaingan berjalan secara sehat tanpa ada kecurangan... Hal yang lain juga tidak terlepas dari peranan pemimpin partainya itu sendiri mbak, misalkan saja yah mbak.... Untuk partai Demokrat, itu sebenarnya bukan semata-mata karna nama parti itu sendiri, tapi juga kharisma daripada Pak SBY itu sendiri, yang membuat orang itu akhirnya percaya dengan system pemerintahan yang beliau pegang...

Selain upaya-upaya di atas, maka hasil focus group discusion merekomendasikan beberapa hal yang sifatnya antisipatif terhadap penyelesaian konflik di Jawa Timur, antara lain dengan :

1. Pengawasan dan pembinaan masyarakat. Pengawasan dan pembinaan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif dan sekaligus identifikasi potensi konflik yang berkembang dari saat ke saat.
2. Slogan-slogan di masyarakat , dimaksudkan untuk membangkitkan semangat dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Kemampuan pemimpin untuk merangkul elemen-elemen masyarakat. Di sini pemimpin daerah tidak harus egosentri dalam melakukan pembinaan masyarakat di daerahnya. baik pendukung maupun bukan pemilihnya adalah warganya. Oleh karena itu kemampuan menggandeng seluruh elem masyarakat menjadi kunci dalam penyelesaian konflik politik ini, baik yang sifatnya masih laten, maupun konflik yang manifes.
4. Peran kepala daerah dalam mengkondisikan pers dan media massa. Media massa adalah media informasi yang dapat membantu dalam menginformasikan isu-isu politik kepada masyarakat.

5. Peranan peringatan hari-hari besar keagamaan menjadi penting dalam penyelesaian konflik, manakala dalam peringatan itu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam peringatan juga perlu dihadiri oleh para petinggi daerah, sehingga jarak social antara pejabat dan rakyatnya semakin dekat, dan efek yang ditimbulkannya adalah adanya perasaan menyatu dan menjadi bagian kelompok masyarakat tersebut.

6. Pendidikan politik bakal calon anggota legislatif (usulan)

Munculnya kasus ketidaksiapan kalah dalam pemilihan umum, ketidaksiapan kalah dalam menggolkan keinginan politik menjadi hal yang perlu diperhatikan terutama dalam seleksi calon legislatif. Oleh karena itu pembinaan politik melalui pendidikan politik secara komprehensif diperlukan agar ada kognisi, afeksi dan konasi yang proporsional ketika berpartisipasi dalam bidang politik.

Tidak selama kasus politik diselesaikan melalui pendekatan sosial kemasyarakatan. Ada kalanya masalah politik diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan adanya kasus-kasus konflik internal partai, maka jalur hukum juga perlu dijalankan, terutama bila proses arbitrase dan jalur persuasi tidak bisa dilakukan. Pemberian saran yang terkait dengan AD/ART dan juga penggunaan jalur hukum menjadi salah satu alternatif penyelesaian konflik internal partai politik.

Memang dalam penyelesaian konflik politik ini tidak seragam cara pengatasannya. Penyelesaian konflik yang dijalankan ada yang dengan model menghindar, ada yang model mengkompetisikan, ada yang model akomodasi, ada

yang dengan model kolaborasi, serta model kompromi seperti yang dimodelkan oleh Robin (2001). Namun pemilihan model penyelesaian konflik antar individu atau kelompok juga harus memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

E. Modal Sosial Penyelesaian Konflik Politik di Jawa Timur

Kabupaten Madiun jarang mengalami konflik karena koordinasi antara aparat keamanan dengan pemerintah daerah sangat harmonis. Kenapa itu bisa terjadi karena bahwa konflik itu sesungguhnya bisa dibuat dan juga bisa dihindari.

Dalam hal ini modal sosial yang sebenarnya berperan adalah adanya kerukunan antar partai dan juga pemerintah untuk saling menghormati satu sama lain. Pemerintah sendiri cukup turut andil untuk menjaga stabilitas kerukunan antar partai. Hal tersebut dapat kita lihat dimana pemerintah juga memfasilitasi adanya sebuah forum antar partai, misalkan saja dalam setahun sekali pemerintah kota mengadakan seminar pemberdayaan partai politik dengan tujuan adanya kumpul bersama antar partai, sebagai wadah untuk saling memberikan pendapat, dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang baik antar partai. Jadi dengan kata lain, walaupun antara satu partai dengan partai yang lain bisa dikatakan sebagai saingan dalam dunia politik namun diharapkan persaingan berjalan secara sehat tanpa ada kecurangan.

Modal sosial yang lain di Madiun yaitu menjalin silaturahmi antara para pemimpin daerah, bupati beserta stafnya dengan para masyarakat. Yaitu

mengadakan BST (Bakti Sosial Terpadu) dengan tujuan berusaha mendekati masyarakat, masyarakat diberi kesempatan oleh bupati untuk memberikan uneg-uneg atau segala permasalahan secara langsung lalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan berusaha mewujudkannya. Bupati juga berusaha terbuka dan masyarakat memberi saran kepada bupati. Pola ini secara tidak langsung masyarakat dilibatkan agar tidak merasa ada yang disembunyikan dalam pemerintahan tersebut. Modal sosial lainnya yaitu dalam hal memilih kepala pemerintah daerah atau bupati. Jika bupati mempunyai kemampuan yang baik bisa mengarahkan para kinerja karyawan menjadi lebih baik, memiliki kharismatik yang kuat dan mempunyai seni perorangan dalam memanage karyawan itu juga mempengaruhi dalam mengurangi konflik politik. Selain itu tingkat kesabaran tinggi dan mau memberikan pengakuan adalah hal terpenting dalam modal sosial bagi pak Agus.

Modal sosial penyelesaian Konflik di Malang dilakukan dengan telah dibentuknya suatu panitia yang di dalamnya beranggotakan macam-macam yang ahli di bidangnya masing-masing seperti oknum kepolisian, lembaga sosial, dll. Dimana peran dari panitia ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat saat hendak diadakannya pemilu. Selain melalui panitia yang beranggotakan beberapa oknum, penyelesaian konflik itu sendiri dapat dengan cara sosialisasi, dimana sosialisasi ini dilakukan dengan cara penyuluhan tentang tata cara kampanye yang baik dan benar, kemudian para caleg masing-masing partai memberikan sosialisasi yang telah disampaikan tadi kepada para

pendukungnya untuk mencegah konflik berkepanjangan. Siapa saja yang bisa menyelesaikan konflik bisa saja terjadi karena pemikiran pemerintah, masyarakat, pimpinan daerah atau dari pemikiran birokrasi. Karena bagaimanapun juga perlu persetujuan dari kepala daerah.

Di Banyuwangi modal sosial yang dimiliki adalah media massa dan pers, tokoh-tokoh masyarakat. Media massa menjadi bagian penting di lingkungan ini mengingat media massa dapat digunakan untuk meredam emosi melalui bentuk-bentuk pemberitaannya. Selain itu, peran tokoh masyarakat menjadi penting karena tokoh inilah yang mampu menggerakkan dan sekaligus meredam terjadinya konflik yang berkelanjutan. Masalahnya di daerah Banyuwangi kadang muncul tokoh yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, sehingga permasalahan terkadang semakin rumit.

Di Malang, modal sosial masyarakat juga muncul terjadi dengan munculnya tokoh masyarakat. Tokoh ini dipilih dan ditokohkan masyarakat karena kemampuan dan kepedulianya terhadap warga masyarakat di daerah itu. Sebut saja wawali yang sekarang ini menjabat adalah tokoh yang sangat dielukan oleh warga masyarakatnya. Apapun yang dilakukan oleh tokoh ini, maka tanggapan masyarakat sangat antusias. Tidak terkecuali dengan adanya peran dalam bidang politik.

Selain tokoh, masyarakat Malang memiliki nilai budaya yang sangat kental. Nilai dan slogan "Arema, Salam Satu Jiwa" yang mulanya muncul dari lingkungan suporter Aremaniak, berubah dan berkembang menjadi nilai budaya

yang juga diterapkan dalam bidang politik. Apapun bentuk potensi konflik politik yang terjadi di Kota Malang, pendekatan budaya dan slogan ini dijadikan sebagai media untuk menurunkan konflik atau potensi konflik politik yang terjadi.

Di Kabupaten Sampang, peran To'ul, Tomas, dan Tojing sangat dominan dalam berbagai kegiatan dan aktivitas sosial dan politik. Hampir setiap aktivitas masyarakat selalu melibatkan ketiga tokoh tersebut. To'ul adalah tokoh ulama, yaitu tokoh masyarakat yang muncul karena kemampuannya dalam bidang keagamaan. Budaya di Madura khususnya Sampang sangat kuat dalam hal ini. Karena masyarakat Sampang sangat menghormati keberadaan ulama ini. Bahkan bila ulama sudah menyampaikan fatwanya, masyarakat Sampang akan menurut walaupun mengorbankan dirinya.

Tokoh masyarakat atau dikenal dengan tomas adalah tokoh informal yang diakui keberadaannya karena peran sosial di masyarakat. Dia memang bukan ulama, namun karena bakti dan perannya dalam memberdayakan masyarakat, maka tokoh masyarakat ini dihormati.

Satu tokoh lagi yang keberadaan sempat menjadi kesepakatan diantara para nara sumber saat wawancara adalah munculnya istilah *Tojing*. *Tojing* singkatan dari tokoh bajing. Terkesan bahwa mereka ini adalah preman. Namun setelah didesak maka istilah tokoh ini adalah tokoh informal saja. Namun bila disorot sejarah ketokohnya memang orang yang masuk tojing ini ada latar belakang yang "hitam", walau tidak semuanya benar. *Tojing* itu jangan disepelekan karena dia tau banyak tentang situasi informal dalam masyarakat.

Selain munculnya tokoh-tokoh tersebut, modal sosial masyarakat .. Sampang juga muncul dalam bentuk pertemuan warga. Lembaga pengajian dan kegiatan ibu-ibu menjadi penting dalam memberdayakan masyarakat. Ada kegiatan pengajian rutin tiap malam juat dan juga ada karang taruna dikalangan para remajanya.

Di kota Surabaya modal sosial yang sebenarnya berperan adalah adanya kerukunan antar partai dan juga pemerintah untuk saling menghormat satu sama lain. Pemerintah sendiri cukup turut andil untuk menjaga stabilitas kerukunan antar partai. Hal tersebut dapat dilihat ketika pemerintah juga memfasilitasi adanya sebuah forum antar-partai. Misalkan saja dalam setahun sekali pemerintah kota mengadakan seminar pemberdayaan partai politik dengan tujuan adanya kumpul bersama antar partai, sebagai wadah untuk saling memberikan pendapat, dan juga untuk menjalin suatu hubungan yang baik antar partai. Jadi dengan kata lain, walaupun antara satu partai dengan partai yang lain bisa dikatakan sebagai saingan dalam dunia politik namun diharapkan persaingan berjalan secara sehat tanpa ada kecurangan.

Hal yang lain juga tidak terlepas dari peranan pemimpin partainya itu sendiri mbak, misalkan saja untuk partai Demokrat, itu sebenarnya bukan semata-mata karna nama partai itu sendiri, tapi juga kharisma daripada Pak SBY itu sendiri, yang membuat orang itu akhirnya percaya dengan sistem pemerintahan yang beliau pegang. Keperimpinan yang karismatik inilah sebenarnya menjadi modal juga dalam menghindari munculnya konflik politik yang terbuka.

Sementara itu, hasil pertemuan dalam focus group discussion didapati bahwa, suatu gambaran bahwa modal sosial masyarakat Jawa Timur sangat beragam. Keberagaman ini ditunjukkan dari permasalahan konflik dan modal sosial masyarakatnya.

Beberapa modal sosial yang dimiliki masyarakat Jawa Timur dalam menangani masalah konflik, yaitu :

1. Forum-forum koordinasi
 - a. FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)
 - b. FKDM (melibatkan tokoh masyarakat, LSM, akademis)
 - c. Kominda
2. Forum komunikasi ormas dan LSM
3. Peran pers dan media massa dalam memunculkan figur-figur pemimpin
4. Nilai-nilai budaya dan slogan-slogan di masyarakat (contoh: AREMA, Salam Satu Jiwa)
5. Munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang kharismatik
6. Kegiatan-kegiatan bakti sosial terpadu
 - a. Mendekatkan pemimpin (dan perangkatnya) dengan masyarakat
 - b. Meningkatkan kepedulian pemimpin terhadap kondisi masyarakat

F. Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Jawa Timur

Modal sosial yang dimiliki masyarakat Jawa Timur selama ini berkembang dan tumbuh tidak dapat dilepaskan dari peran tiga lembaga, yaitu :

1. Pemimpin formal dan perangkatnya
- .. 2. Figur pemimpin informal di masyarakat
3. Pers dan media massa

Keberadaan pemimpin formal seperti Bupati, dan perangkatnya serta kepolisian beserta peran dan fungsinya tidak bisa dilepaskan dari pengembangan modal sosial ini. Pemimpin formal yang dihormati dan konsisten dalam kebijakannya membela masyarakat akan menjadi bekal dalam membangun modal sosial untuk menghindari terjadinya konflik politik.

Munculnya figur pemimpin informal di masyarakat juga menjadi salah satu modal sosial yang penting. Figur pemimpin ini umumnya dijadikan model perilaku bagi warganya. apapun yang dilakukan dan diperintahkan seringkali tidak mendapatkan pertentangan dari warganya, terlebih lagi bila tokoh informal ini menunjukkan simpati dan usahanya dalam membela warga masyarakatnya. Pendekatan terhadap tokoh informal dalam membangun nilai dan budaya di masyarakat sangat signifikan bagi program pembangunan maupun pencegahan terhadap munculnya konflik politik. Konflik akan murung manakala para elite yang terdiri dari tokoh informal ini ikut andil dan menjadi bagian konflik kepentingan. Namun bila tokoh informal ini tidak terlibat dalam konflik kepentingan, khususnya yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan, maka kondisi masyarakat tidak akan terpengaruh.

Pers dan media massa juga tidak tertinggal dalam perannya mengembangkan modal sosial. Ketika nilai-nilai positif dalam penyelesaian

konflik politik di masyarakat terkristal dan nilai itu harus ditanamkan kepada masyarakat, maka peran media informasi ini menjadi sangat penting. Media massa yang memberikan informasi secara berimbang dan proporsional menurut kemampuan pembaca dan pihak yang bersangkutan dengan masalah politik akan sangat membantu dalam menciptakan ketenangan dan pembelajaran bagi warga masyarakat.

G. Pembahasan

1. Pola Konflik Partai Politik

Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama (Surbakti, 1992)

Konflik politik tidak bisa dilepaskan dari adanya keterbatasan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Menurut Franz Magnis Soeseno (2000) menyebutkan, bila dalam sebuah masyarakat mengalami peningkatan dalam intensitas kekerasan, berarti masyarakat itu sakit. Itu disebabkan mereka tidak lagi mampu menangani tekanan-tekanan, misalnya karena merasa terus-menerus diperlakukan dengan tidak adil, tidak berdaya, atau karena menyaksikan ketidakadilan mencolok tanpa dapat berbuat apa-apa. Menurutnya, paling tidak ada empat faktor yang membuat masyarakat bertindak dengan kekerasan. Pertama,

transformasi dalam masyarakat. Modernisasi dan globalisasi merupakan tekanan luar biasa yang membuat masyarakat kita berada dalam keadaan tegang terus-menerus. Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat, ketiga, munculnya masyarakat yang sakit, dan keempat, orde baru sebagai sistem institusionalisasi kekerasan (Sukemi, Surabaya Post, 2000).

Dari kasus-kasus konflik yang terbuka di masyarakat menunjukkan bahwa pola konflik terjadi karena masalah kepentingan-kepentingan tersebut. Memang konflik ini kadang muncul antar partai, dan tidak juga konflik muncul dari dalam partai itu sendiri. Ketika kursi kepemimpinan hanya satu, sementara ada pihak anggota organisasi lain yang juga menginginkan kekuasaan tersebut, maka konflik internal partai juga tidak bisa dihindarkan.

Kasus yang terjadi di Banyuwangi terutama ketika partai kecil (gurem) memenangkan pemilihan bupati, menjadi contoh bahwa sebenarnya perebutan kekuasaan antara elit politik terjadi, dan elit dari partai besar terkesan tidak rela dalam menghadapi kekuasaan yang dipimpin oleh partai gurem. Dalam kasus ini tampak bahwa antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif tidak sejalan (inharmonis). Oleh karena itu selama konflik kepentingan partai ini masih terjadi, maka selama itu pula kondisi konflik akan berkepanjangan.

Berbeda dengan kasus yang dialami Kabupaten Madiun. Hubungan yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif yang ditunjukkan melalui bakti sosial di atas mencerminkan pola hubungan elit yang harmonis. Satu pihak tidak merasa direndahkan oleh pihak lainnya. Semua berorientasi pada kepentingan masyarakat

ketika menghadapi masyarakat. Dengan pola hubungan ini tampak konflik menjadi terhindarkan.

2. Modal Sosial dan Pengembangannya

Apa yang dilakukan kabupaten madiun melalui Bakti sosial bersama merupakan modal sosial yang khas mataramannya. Birokrat terkesan sebagai *problem solver* bagi masyarakat. Kehadiran pemimpin dan para tokoh di masyarakat secara langsung dengan warga menunjukkan gaya kepemimpinan yang mirip dengan pola pemerintahan jaman mataram. Dalam hal ini Raja adalah pelindung dan pengayom rakyat. Segala keluh kesah rakyat menjadi tanggung jawab rajanya.

Penyertaan masyarakat dalam Bakti Sosial terpadu juga merupakan salah satu model pemberdayaan modal sosial yang penting. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk usaha pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meski ada legislatif yang terlibat, maka anggota legislatif itu juga bisa langsung mendengarkan keluhan konstituennya.

Modal sosial lainnya yang penting untuk dibahas adalah adanya nilai masyarakat Malang yang menunjukkan adanya semangat kebersamaan. *Arema salam satu jiwa* menjadi slogan dalam menyelesaikan konflik politik. Dalam slogan ini prinsip kesejajaran dan kesepadanan peran dan fungsi serta prinsip

egaliter sangat tampak. Slogan ini menjadi nilai yang menjiwa ketika ada pemimpin yang menjadi model dan panutan masyarakatnya.

Ketokohan dalam masyarakat juga menjadi modal sosial berikutnya yang menarik untuk dikaji. Tokoh adalah model bagi masyarakat. Dalam konsep teori modeling yang dikembangkan Bandura, tokoh akan ditiru oleh warganya. Setelah meniru, identifikasi nilai juga akan menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku warga. Oleh karena itu tokoh masyarakat menjadi bermakna dalam pengembangan modal sosial ketika model perilakunya banyak bermanfaat bagi warganya. apabali model perilaku ini berhubungan dengan masalah konflik politik, maka model tokoh ini juga harus bisa menjadi panutan warga dalam mereduksi konflik.

Penelitian Irtanto di Banyuwangi (http://www.balitbangjatim.com/jurnal_mainIsi_detail.asp?id_jurnal=13&id_isi=22&hal=1) menyimpulkan adanya peran tokoh elit yang dapat menyebabkan konflik politik. Dia menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah sangat terganggu dengan adanya konflik kepentingan diantara elit politik tersebut. Apabila kasus ini ditarik, sebenarnya peran model menjadi sangat penting untuk melakukan resolusi konflik politik.

Dari kasus-kasus ini maka hal lain yang menjadi pelajaran adalah bahwa modal sosial itu sangat khas sesuai dengan daerah, serta modal sosial itu dapat tumbuh dan berkembang dari budaya lokal. Untuk membuat modal sosial ini menjadi bermanfaat dalam menyelesaikan konflik politik, maka dibutuhkan adanya adaptasi bagi daerah lain bila akan mengadopsinya. Pola ketokohan di

Sampang tidak langsung dapat diterapkan di Madiun. Pola ketokohan pemimpin di Madiun tidak bisa langsung diterapkan di Malang, dan seterusnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pola konflik politik di masyarakat Jawa Timur.

Konflik politik di Jatim umumnya tidak bersifat terbuka, dan cenderung latent. Kalaupun sampai terbuka, maka peran elit dan tokoh masyarakat sangat dominan.

2. Pola penyelesaian konflik politik masyarakat Jawa Timur

Penyelesaian konflik di Jawa timur melalui berbagai media. Penyelesaian secara langsung dilakuka bila terjadi konflik yang terbuka. Smeentara itu penyelesaian konflik yang bersifat preventif dilakukan dengan antara lain:

- a. Pengawasan dan pembinaan masyarakat,
- b. Slogan-slogan di masyarakat,
- c. Upaya dan kemampuan pemimpin untuk merangkul elemen-elemen masyarakat,
- d. Peran kepala daerah dalam mengkondisikan pers dan media massa,
- e. Pemanfaatan peringatan hari-hari besar keagamaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta
- f. Diusulkannya pendidikan politik bakal calon anggota legislatif

3. Modal sosial yang menjadi model penyelesaian konflik politik di Jawa Timur

- a. Forum-forum koordinasi seperti : FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), FKDM (melibatkan tokoh masyarakat, LSM, akademis), dan Kominda
 - b. Forum komunikasi ormas dan LSM
 - c. Peran pers dan media massa dalam memunculkan figur-figur pemimpin
 - d. Nilai-nilai budaya dan slogan-slogan di masyarakat (contoh: AREMA, Salam Satu Jiwa)
 - e. Munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang kharismatik
 - f. Kegiatan-kegiatan bakti sosial terpadudengan tujuan mendekatkan pemimpin (dan perangkatnya) dengan masyarakat, dan meningkatkan kepedulian pemimpin terhadap kondisi masyarakat
4. Pelaku yang mengembangkan modal sosial yang selama ini ada di masyarakat terdiri atas tiga unsur yaitu pemimpin formal dan perangkatnya, figur pemimpin informal di masyarakat, dan pers dan media massa.

B. Saran-Saran

1. Pendidikan politik bagi tokoh masyarakat diharapkan dapat dilakukan
2. Pendidikan politik bagi anggota legislatif sebelum menjabat

3. Pengembangan modal sosial baru di masyarakat dengan menggali potensi budaya lokal di masyarakat, dan bila akan diterapkan di daerah lain maka modifikasi perlu dilakukan
4. Pendekatan antar partai, antar legislatif dan eksekutif, serta antar tokoh masyarakat dengan pemimpinnya menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mereduksi konflik politik. Oleh karena itu kerjasama antar elemen ini perlu dibangun secara kondusif.
5. Untuk penelitian lanjutan, kami menyampaikan saran perlunya dilakukan kaji tindak tentang **PENGEMBANGAN MODEL PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK DI JATIM BERDASARKAN PADA MODAL SOSIAL MASYARAKAT.**
6. Dari uraian dan hasil diskusi ini, maka modul pelatihan yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian ini berksar pada beberapa topic berikut: (a) Peningkatan kematangan pribadi (untuk para tokoh politik) dan pemimpin formal maupun non-formal, (b) Kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kasi potensi konflik, (c) Kemampuan membuat keputusan untuk pengambilan kebijakan, (d) Kemampuan psikologi massa, (e) Kemampuan manajemen konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2009) *Bentuk-Bentuk Konflik Politik* <http://grms.multiply.com/journal/item/28> Diakses pada Maret 2009)
- Badan Pusat Statistik. (2007). Tingkat kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 38, 1-5.
- Batimang. (2005). *Mengurai Konflik Etnis di Sambas*. Diunduh dari <http://www.davakology.com/kr/ind>, pada tanggal 25 September 2005.
- De Dreu, C KW, dan Gelfand, M. J. (2007) *The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations*. New York : Lawrence Erlbaum Associate.
- Falzer, P. R. (2007). Developing and using social capital in public mental health. *Mental Health Review Journal*, 12, 34-42.
- Fenwick, R., & Tausing, M. (2007). Work and the political economy of stress: Recontextualizing the study of mental health/illness in sociology. Dalam W. R. Avison, J. D. McLeod, & B. A. Pescosolido, *Mental health, social mirror* (hal. 143-167). New York: Springer.
- Fukuyama, F., 1995. *Trust*, NY: Hamish Hamilton, Ltd.
- Goldstein, A.P 2002. *The Psychology of Group Aggression*. Chichester, West Sussex : John Wiley and Sons, Ltd.
- Harris, O.J., dan Hartman, S.J. 2002. *Organizational Behavior*, New York: Best Business Book.
- Irtanto, Konflik Elit Politik Lokal Dalam Proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi http://www.balitbangjatim.com/jurnal/Mainisi_Detail_Asp?Id_Jurnal=13&Id_Issue=22&Hal=1
- Kondalkar, VG. 2007. *Organizational Behavior*. New Delhi: New Age International Limited Publisher.
- Kusnadi. 2005. *Dinamika Kelompok Etnik, Etnisitas, & Pembangunan Daerah (Konflik Sosial dalam Perebutan Sumber Daya)*. <http://www.152.118.58.226>, 27 September 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2009) *Bentuk-Bentuk Konflik Politik* <http://grms.multiply.com/journal/item/28> Diakses pada Maret 2009)
- Badan Pusat Statistik. (2007). Tingkat kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 38, 1-5.
- Batimang. (2005). *Mengurai Konflik Etnis di Sambas*. Diunduh dari <http://www.davakology.com/kr/ind>, pada tanggal 25 September 2005.
- De Dreu, C KW, dan Gelfand, M. J. (2007) *The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations*. New York : Lawrence Erlbaum Associate.
- Falzer, P. R. (2007). Developing and using social capital in public mental health. *Mental Health Review Journal*, 12, 34-42.
- Fenwick, R., & Tausing, M. (2007). Work and the political economy of stress: Recontextualizing the study of mental health/illness in sociology. Dalam W. R. Avison, J. D. McLeod, & B. A. Pescosolido, *Mental health, social mirror* (hal. 143-167). New York: Springer.
- Fukuyama, F., 1995. *Trust*, NY: Hamish Hamilton, Ltd.
- Goldstein, A.P 2002. *The Psychology of Group Aggression*. Chichester, West Success : John Wiley and Sons, Ltd.
- Harris, O.J., dan Hartman, S.J. 2002. *Organizational Behavior*, New York: Best Business Book.
- Irtanto, Konflik Elit Politik Lokal Dalam Proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi http://www.balibangjawa.com/jurnal/Mainisi_Detail_Asp?Id_Jurnal=13&Id_Artikel=22&Hal=1
- Kondalkar, VG. 2007. *Organizational Behavior*. New Delhi: New Age International Limited Publisher.
- Kusnadi. 2005. *Dinamika Kelompok Etnik, Etnisitas, & Pembangunan Daerah (Konflik Sosial dalam Perebutan Sumber Daya)*. http://www.balibangjawa.com/jurnal/Mainisi_Detail_Asp?Id_Jurnal=13&Id_Artikel=22&Hal=1, 27 September 2005.

- McKenzie, K. & Harpham, T. 2006. Meaning and uses of sosial capital in the mental health field. Dalam K. McKenzie, & T. Harpham, *Sosial capital and mental health* (hal. 11-23). London: Jessica Kingsley Publisher.
- Mohan, G., & Mohan, J. 2002. Placing sosial capital. *Progress in Human Geography*, 26, 190-210.
- Narayan, D., & Cassidy, M. F. 2001. A dimensional approach to measuring sosial capital: development and validation of a sosial capital inventory. *Current Sociology*, 49, 59-102.
- Pondy, L.R., quarterly Sept.1969, Organization Conflict, Concepts and Models, *administrative science*, pp 296-320.”
- Pruit, G., D., dan Rubin, Z., J. 2004. *Seri Psikologi Sosial. Teori Konflik Psikologi Sosial*. Penerjemah: Helly Soetjipto dan Sri Mulyantini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. R. 2001 . *Organizational Behaviour*, Ninth Edition, New Delhi: Prentise Hall
- Sukemi, 2000. Sampang Kenapa Terus Bergolak. *Surabaya Post*, Suplemen, 13 September 2000
- Shoemake, A., 2005. Komunikasi dan Komunitas di Indonesia: Penghancuran dan Penumbuhan Kembali Modal Sosial di Maluku. Diunduh dari <http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ann.htm>, pada tanggal 27 September 2005.
- Terrion, J. L. 2006. Building sosial capital in vulnerable families: Success markers of a school based intervention program. *Youth and Society*, 38, 155-176.
- Widiastono; T. D., 2008. Nasib bangsa yang risau. Dalam *Kompas*, Jumat, 15 Agustus 2008, hal. 6.
- World Health Organization, 2004. *Promoting mental health: Concept, emerging evidence, practice*. Geneva: World Health Organization.
- Yaqin, A., M., 2005. *Pendidikan Multikultural. Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PADA INFORMAN

I. Identitas informan

- a. nama :
- b. jenis kelamin :
- c. pengalaman penting informan
- d. alasan dipilihnya sebagai informan
- e. Waktu wawancara
- f. Tempat wawancara
- g. Pewawancara

II. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimanakah pendapat Anda peta konflik di Jawa Timur itu?
- b. Bagaimanakah pendapat Anda peta konflik di wilayah kabupaten / kota Anda berdasarkan kasus-kasus yang selama ini Anda ketahui?
- c. Menurut Anda, khusus konflik untuk politik bagaimanakah pola-pola konflik yang terjadi?
- d. Dalam konflik-konflik politik ini, siapakah yang terlibat dalam konflik?
- e. Siapakah yang menyelesaikan konflik tersebut?
- f. Modal sosial apakah yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik?
- g. Siapakah yang memiliki ide atau sumber dari modal sosial tersebut?
- h. Bagaimanakah modal sosial itu bisa ditanamkan pada masyarakat atau organisasi sosial politik di lingkungan tersebut?

LAMPIRAN 2

GUIDLINE PEDOMAN PELAKSANAAN FGD

I. Identitas Peserta FGD :

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Alamat
- d. Pekerjaan :
- e. Alasan dipilihnya sebagai informan
- f. Waktu Pelaksanaan FGD
- g. Tempat Pelaksanaan FGD
- h. Moderator
- i. Pembantu Moderator / Notulensi

II. Daftar Pertanyaan Pokok

- a. Bagaimanakah pendapat Anda tentang peta konflik di Jawa Timur itu?
- b. Bagaimanakah pendapat Anda peta konflik di wilayah kabupaten / kota Anda berdasarkan kasus-kasus yang selama ini Anda ketahui?
- c. Bagaimanakah pola-pola konflik politik yang terjadi?
- d. Dalam konflik-konflik politik ini, siapakah yang terlibat dalam konflik?
- e. Siapakah yang menyelesaikan konflik tersebut?
- f. Bentuk-bentuk modal sosial apakah yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan konflik?

- g. Siapakah yang memiliki ide atau sumber dari modal sosial tersebut?**
- h. Bagaimanakah modal sosial itu bisa ditanamkan pada masyarakat atau organisasi sosial politik di lingkungan tersebut sehingga menjadi budaya masyarakatnya?**
- i. Saran-saran apakah yang bisa Anda berikan terkait dengan konflik politik di Jawa Timur?**

Lampiran 3 DOKUMENTASI PELAKSANAAN FGD





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 14 Agustus 2009

Nomor : 072 / 6169 / 203/2009
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Walikota/Bupati
di
JAWA TIMUR

Up. Ka Bakesbang dan Politik

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga
Tanggal : Agustus 2009
Nomor : 1067/H3.1.9/PPd/2009

Bersama ini diberitahukan :

Nama : Prof. Dr. SURYANTO
Alamat : Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya
Pekerjaan : Dosen
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/ research

Judul : " MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) MASYARAKAT JAWA
TIMUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK POLITIK DI
MASYARAKAT "

Pembimbing : -

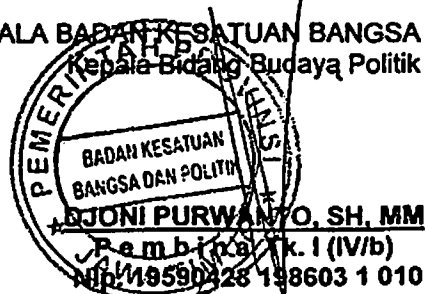
Peserta : -

Waktu : 6 (enam) bulan
Lokasi : • Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

1. Para Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
2. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama

Demikian harap menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Dekan Fak. Psikologi UNAIR
di Surabaya.
2. Sdr. Yang bersangkutan.

SURYANTO

MODAL SOSIAL ...